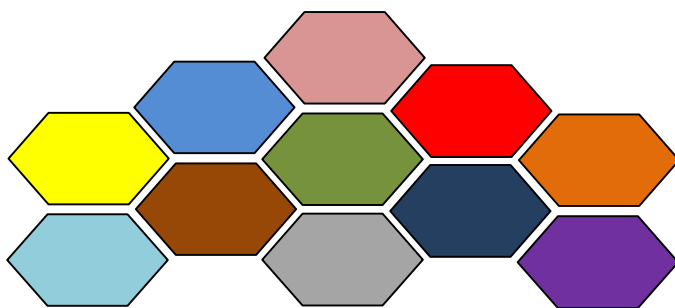




RENCANA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
TAHUN 2018



BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL
Jl. Dr. Soetomo no.1 Slawi

Lampiran : Surat Keputusan Kepala Badan
Kepegawaian, Pendidikan dan
Pelatihan Daerah Kabupaten
Tegal

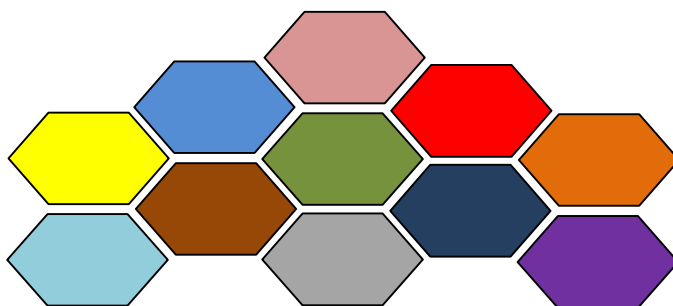
Nomor : TAHUN 2017

Tanggal : 5 September 2017

RENCANA KERJA

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

TAHUN 2018



**BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN
DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL**
Jl. Dr. Soetomo no.1 Slawi

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas karunia dan Ridha-Nya dokumen Rencana Kerja (Renja) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKD) Kabupaten Tegal Tahun 2018 dapat diselesaikan dengan baik. Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini merupakan dokumen perencanaan satu tahunan yang menjadi pedoman dan acuan dalam penyelenggaraan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Tegal pada tahun anggaran 2018 sebagai penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014 – 2019.

Kami menyadari bahwa lingkungan strategis bidang kepegawaian di Kabupaten Tegal akan selalu berkembang secara dinamis. Oleh karena itu masukan berupa kritik dan saran yang konstruktif dari segenap pemangku kepentingan sangat kami harapkan, sehingga Renja ini dapat secara efektif menjadi medium bagi peningkatan kinerja pembangunan kepegawaian dan pewujudan pemerintahan yang baik di Kabupaten Tegal.

Akhirnya, kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberkati setiap usaha kita untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

Slawi, 5 September 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL



Drs. EPI BUDIYANTO, M.Pd

Pembina Utama Muda

NIP. 19610614 19801 1 001

DAFTAR ISI

	Halaman
Surat Penetapan Rencana Kerja (Renja) BKD Kab. Tegal	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR GRAFIK	iii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan	4
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU	6
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan	6
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38
2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD	40
2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	55
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKD KABUPATEN TEGAL	56
3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	56
3.2. Tujuan dan Sasaran Renja OPD	56
3.2. Program dan Kegiatan	57
BAB IV PENUTUP	69

DAFTAR GRAFIK

	Halaman
1. Grafik 2.1 : Target dan Realisasi Jumlah Peserta Diklat Teknis Tahun 2015-2019	7
2. Grafik 2.2 : Target dan Realisasi Jumlah CPNS Tahun 2015-2019	9
3. Grafik 2.3 : Target dan Realisasi Jumlah PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar Tahun 2015-2019	10
4. Grafik 2.4 : Target dan Realisasi Jumlah Jabatan Fungsional Baru (non Guru dan non Kesehatan) Tahun 2016.....	14
5. Grafik 2.5 : Perbandingan Jumlah Kekurangan Pegawai dan Penerimaan Pegawai Tahun 2011 s/d 2016	15
6. Grafik 2.6 : Minus Growth Pertumbuhan Pegawai Tahun 2011 s/d 2016	15
7. Grafik 2.7 : Jumlah PNS Ijin Belajar dan Ijin Penggunaan Gelar Tahun 2009 s/d 2016.	20
8. Grafik 2.8 : Jumlah Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenisnya Tahun 2011 s/d 2016 ..	21
9. Grafik 2.9 : Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2011 s/d 2016	22
10. Grafik 2.10 : Jumlah PNS penerima SKKP dan PNS Pensiun Tahun 2011 s/d 2016	23
11. Grafik 2.11 : Jumlah Penerima SLKS Tahun 2011 s/d 2016	23
12. Grafik 3.1 : Anggaran Kegiatan BKD Kabupaten Tegal Tahun 2013 s/d 2018	58

DAFTAR TABEL

	Halaman
1. Tabel 2.1 : Jenis JFT Terampil dan JFT Ahli	12
2. Tabel 2.2 : Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016	24
3. Tabel 2.3 : Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32
4. Tabel 2.4 : Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	42
5. Tabel 3.1 : Rumusan Rencana Program dan Kegiatan BKD Kabupaten Tegal Tahun 2018 dan Perkiraan Maju Tahun 2019	60

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tegal, Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mengalami perubahan nama menjadi Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Daerah (BKPD) Kabupaten Tegal dan penambahan kewenangan yaitu menjadi kewenangan dibidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan. Rencana Kerja (Renja) BKD Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD Kabupaten Tegal pada tahun 2018. Secara filosofis penyusunan Renja berfungsi sebagai dokumen perencanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan ditujukan sebagai acuan BKD Kabupaten Tegal dalam mewujudkan visi dan misi Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Adapun visi Kabupaten Tegal yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera” dengan dilandasi semangat “Cinta Desa, Cinta Rakyat, Cinta Produk Tegal, dan Cinta Budaya Tegal”. Selain itu penyusunan Renja Tahun 2018 adalah sebagai landasan pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan yang telah direncanakan. Sedangkan misi Kabupaten Tegal adalah:

1. Mewujudkan birokrasi yang bersih dan responsif terhadap pemenuhan hak dasar rakyat;
2. Mewujudkan kesejahteraan rakyat melalui pembangunan ekonomi kerakyatan yang difokuskan pada sektor perdagangan, industri dan pertanian;
3. Mewujudkan kehidupan *paceduluran* dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama;
4. Mengembangkan seni budaya dan pengetahuan tradisional;
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui penguatan kelembagaan dan pemberdayaan masyarakat.

Dalam penyusunan Renja ini tetap mempertimbangkan beberapa hal, pertama, program kerja dan kegiatan yang direncanakan berdasarkan pada tugas pokok dan fungsi BKD Kabupaten Tegal sebagai pengelola kepegawaian. Kedua, adanya kesesuaian antara program kerja dan kegiatan yang direncanakan dengan

kemampuan pembiayaan yang tersedia. Ketiga, program kerja dan kegiatan yang direncanakan dirumuskan secara jelas dan terukur *output* dan *outcome*-nya, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) harus dikelola berdasarkan prestasi kerja. Keempat, adanya upaya untuk mempertahankan dan meningkatkan capaian kinerja di tahun-tahun sebelumnya.

Penyusunan Renja ini perlu mendapatkan perhatian yang serius, karena Renja merupakan penjabaran dari Renstra dan mempunyai arti penting yang setara. Baik Renstra dan Renja akan secara bersama-sama menjadi faktor penentu keberhasilan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan dan terwujudnya pemerintahan yang baik di Kabupaten Tegal.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2018 didasarkan pada landasan hukum sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka (RPJP) Provinsi Jawa Tengah 2005-2025;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Provinsi Jawa Tengah 2008-2013;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Tegal Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 5 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tata Cara Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Struktur Perangkat Daerah Kabupaten Tegal;
13. Surat Edaran Bupati Tegal Nomor 050/0266/2017 tanggal 10 Januari 2017 tentang Arah Kebijakan Pembangunan Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebagai Pedoman Penyusunan RKPD Tahun 2018 dan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018;
14. Peraturan Bupati Tegal Nomor 52 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Tegal Tahun 2018;
15. Keputusan Bupati Tegal Nomor 1059 Tahun 2014 tentang Pengesahan Rancangan Akhir Rencana Strategis (Renstra) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019;
16. Keputusan Bupati Tegal Nomor 571 Tahun 2017 tentang Pengesahan Rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2018.

1.3. Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renja BKD Kabupaten Tegal tahun 2018 sebagai dokumen resmi perencanaan daerah mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

1. sebagai penjabaran visi dan misi yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 periode tahun 2018;
2. sebagai arah bagi pelaksanaan kegiatan dan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2018;
3. sebagai pedoman bagi segenap pemangku kepentingan (*stakeholders*) kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal dalam melaksanakan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2018;

4. sebagai alat ukur keberhasilan pembangunan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan di Kabupaten Tegal pada tahun 2018;
5. sebagai landasan bagi pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dan kegiatan kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pada tahun 2018;
6. sebagai arah bagi penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) di BKD Kabupaten Tegal pada tahun 2018.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini memuat gambaran umum penyusunan Renja Perangkat Daerah yang terdiri dari: Latar Belakang, Landasan Hukum, Maksud dan Tujuan serta Sistematika Penulisan agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Bab ini memuat kajian (*review*) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan. Dikaitkan dengan pencapaian target Renstra berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja tahun sebelumnya.

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun Indikator Kinerja Kunci sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Berisikan uraian mengenai sejauhmana tingkat kinerja pelayanan dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan; permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi; dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional/internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan MDGs (*Millenium Developmnet*

Goals); tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang direncanakan.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan; penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan; dan penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten.

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1. Telaah terhadap Kebijakan Nasional

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

3.2. Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah

3.3. Program dan Kegiatan

Berisikan penjelasan mengenai : Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan; Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan; dan Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

BAB IV PENUTUP

Berisikan uraian penutup berupa : catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

BAB II
EVALUASI PELAKSANAAN
RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Perkiraan Tahun Berjalan

Evaluasi pelaksanaan Kegiatan BKD Kabupaten Tegal tahun 2016 dapat dijabarkan sebagai berikut:

1. BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (mengacu pada RPJMD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019)

Sesuai dengan tupoksi, BKD bertanggung jawab untuk melaksanakan 3 (tiga) program dengan ukuran keberhasilan pelaksanaannya tercermin dalam 11 (sebelas) target indikator kinerja pada pelaksanaan RPJMD Tahun 2016 sebagai berikut :

1) Program Pendidikan Kedinasan

a) Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan ditargetkan untuk mengirimkan 40 orang peserta Diklatpim dengan realisasi pengiriman peserta Diklatpim II 6 orang, Diklatpim III 5 orang dan Diklatpim IV 21 orang dan capaian kinerja sebesar 80% dari target yang telah ditetapkan.

Permasalahan yang dihadapi adalah keterbatasan anggaran, mengingat bentuk dari kegiatan ini adalah pengiriman dan biayanya telah ditetapkan melalui indeks dari LAN. Selain itu, adanya kebijakan pengangkatan JPT Pratama, yang mensyaratkan penggunaan metode Seleksi Terbuka, ikut andil dalam penentuan pengalokasian pemberangkatan peserta Diklatpim II.

Untuk tahun 2017, direncanakan akan mengirimkan Diklatpim sejumlah 38 orang, hal ini juga belum sesuai dengan jumlah Diklatpim yang ditargetkan dalam Rencana Kerja yaitu sebanyak 40 orang.

2) Program Peningkatan Kapasitas Sumberdaya Aparatur

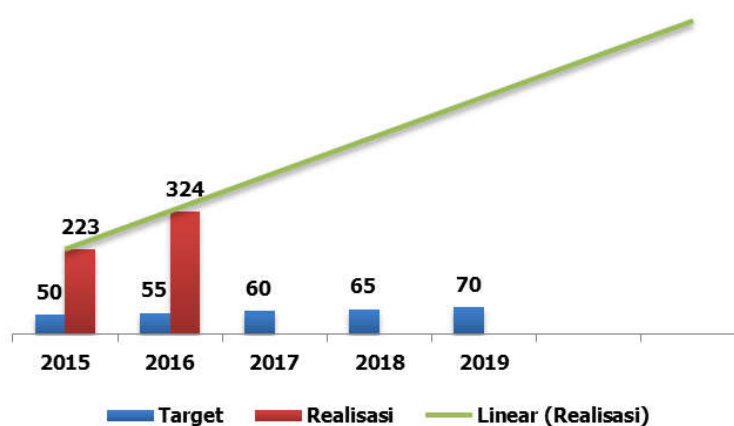
a) Jumlah Peserta Diklat Teknis

Pada tahun 2016 BKD telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan realisasi peserta Diklat Teknis sebanyak 324 orang dan capaian kinerja sebesar 589% dari target yang telah ditetapkan sebanyak 55 (lima puluh lima) orang.

Capaian target sebesar 589% disebabkan karena pada saat penyusunan indikator kinerja RPJMD Tahun 2014-2019 tidak mengakomodir peserta diklat teknis yang berasal dari luar pegawai BKD, ketersediaan anggaran di BKD untuk mengakomodir pelaksanaan diklat teknis bagi seluruh PNS Kabupaten Tegal sangat minim (belum diterapkan kebijakan diklat satu pintu), serta data PNS yang mengikuti diklat teknis dengan anggaran diklat yang berasal dari masing-masing Perangkat Daerah sangat sulit didapatkan. Dengan demikian, indikator kinerja yang diusulkan hanya peserta diklat teknis yang berasal dari BKD.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya adalah perlunya kebijakan pelaksanaan diklat satu pintu agar mempermudah bagi BKD dalam melaksanakan Manajemen ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Adapun upaya yang dilakukan adalah dengan penerapan hasil AKD serta mengakselerasi penerapan “diklat satu pintu”, mengusulkan revisi tupoksi kediklatan ke Bagian Organisasi serta memberikan “pencerahan” kepada Perangkat Daerah yang bertugas mengalokasikan pagu anggaran. Pada tahun 2017, Jumlah Peserta Diklat Teknis ditargetkan untuk mengirimkan 60 orang.

Grafik 2.1
Target dan Realisasi Jumlah Peserta Diklat Teknis
Tahun 2015-2019



b) Jumlah Peserta Diklat Fungsional

Pada tahun 2016 BKD telah melaksanakan kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal dengan realisasi jumlah peserta Diklat Fungsional sebanyak 50 orang dari target yang telah ditetapkan sebanyak 25 (dua puluh lima) orang.

Berdasarkan Rencana Kerja tahun 2017 untuk indikator jumlah Peserta Diklat Fungsional adalah sejumlah 72 orang meliputi 20 orang diklat lanjutan bagi JFT formasi CPNS, Diklat Dasar satpol PP sejumlah 47 orang, dan diklat fungsional bagi JFT bidang kesehatan, pendidikan dan teknis sejumlah 5 orang.

c) Persentase jabatan struktural yang terisi

Jabatan struktural yang terisi pada tahun 2016 sebesar 93% dari target yang telah ditetapkan sebesar 94%. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai indikator kinerja ini adalah bahwa pelaksanaan pengisian jabatan lowong maupun rotasi merupakan kewenangan mutlak dari Bupati, sehingga dalam pelaksanaannya seringkali tidak sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Hal ini menyebabkan BKD sering mengalami kesulitan dalam pengalokasian pagu anggaran.

Sesuai dengan Rencana Kerja Tahun 2017, BKD akan melaksanakan 2 kali pengambilan sumpah/janji eselon II dan 7 kali pengambilan sumpah/janji eselon III/IV.

d) Persentase CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan

Realisasi Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pra Jabatan Bagi CPNSD pada tahun 2016 adalah sebesar 0% CPNS yang mengikuti Diklat Prajabatan dari target yang telah ditetapkan sebesar 100%.

Target tidak tercapai karena adanya moratorium pengadaan CPNS sesuai dengan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Adanya surat tersebut mengakibatkan tidak adanya tambahan formasi CPNS dari pelamar umum pada tahun 2015 sehingga tidak dilaksanakan kegiatan Diklat Prajabatan pada tahun 2016.

3) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur

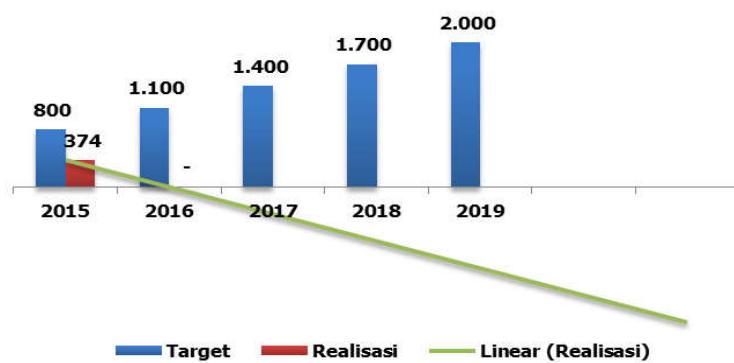
a) Jumlah CPNS

Pada tahun 2016, indikator kinerja Jumlah CPNS ditargetkan sebesar 1.100 orang, dengan capaian kinerja sebesar 0% dari target yang telah ditetapkan. Hal ini karena adanya surat Menpan & RB tentang Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015. Penundaan Penambahan Pegawai ASN tahun 2016 merupakan kendala utama dalam pencapaian indikator kinerja ini mengingat penambahan pegawai merupakan kebijakan pemerintah pusat.

Adapun rencana tindak lanjut yang akan dilakukan adalah dengan menindaklanjuti instruksi dari Menpan & RB agar pemerintah kabupaten/kota melaksanakan analisis jabatan dan analisis beban kerja menggunakan aplikasi *e-formasi* serta perbaikan dalam penghitungan kebutuhan pegawai.

Tahun 2017 BKD menargetkan tambahan CPNS sejumlah 500 orang dengan asumsi pemerintah mencabut moratorium pengangkatan CPNS. Disamping itu PTT dari kementerian lain seperti PTT Bidang yang telah dilakukan seleksi CPNS pada tahun 2016 dapat segera terealisasi surat keputusannya.

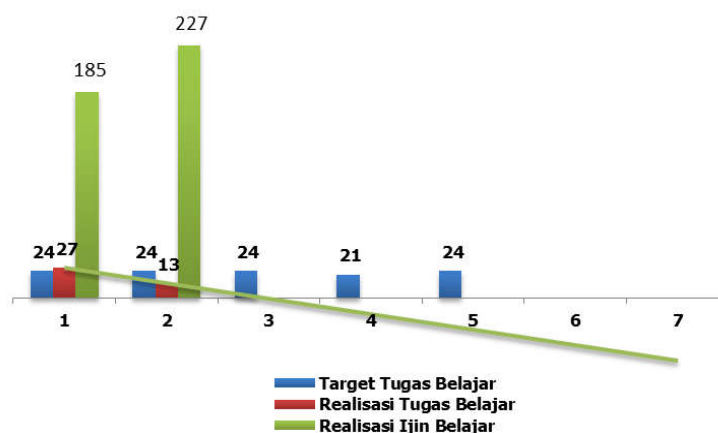
Grafik 2.2
Target dan Realisasi Jumlah CPNS
Tahun 2015 - 2019



b) Jumlah PNS Tugas Belajar

Pada tahun 2016 Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas terealisasi sejumlah 13 PNS Tugas Belajar, dengan capaian kinerja sebesar 54,17% dari target yang telah ditetapkan sejumlah 24 orang.

Grafik 2.3
Target dan Realisasi Jumlah PNS Tugas Belajar dan Ijin Belajar
Tahun 2015 – 2019



Permasalahan yang timbul adalah menurunnya minat peserta tugas belajar, dan beralih ke ijin belajar. Adapun rekomendasi dan tindak lanjut yang akan dilakukan adalah memperketat ijin belajar guna meningkatkan kualitas, serta mengarahkan jurusan yang akan diambil agar sesuai dengan kebutuhan unit kerja dan formasi. Adapaun pada tahun 2017 BKD menargetkan jumlah PNS yang mengikuti tugas belajar sejumlah 3 orang.

c) Jumlah kasus kepegawaian

Pada tahun 2016 Jumlah kasus kepegawaian yang tertangani sejumlah 52 kasus dari target 48 kasus. Untuk indikator kinerja ini capaian realisasinya kurang dari target yang telah ditetapkan, hal ini terlihat dengan meningkatnya jumlah kasus kepegawaian. Dengan demikian, target kinerja ini merupakan target negative yaitu realisasi yang lebih rendah dari target yang telah ditetapkan merupakan prestasi.

Sesuai dengan PP Nomor 53 Tahun 2010, bahwa kewenangan atas pembinaan PNS berada pada atasan langsung PNS tersebut, sehingga Perangkat Daerah turut andil dalam kesuksesan pelaksanaan pembinaan disiplin terhadap pegawai. Selain itu, masih diperlukan upaya ekstra terutama penambahan frekuensi sidak guna mengurangi tingkat indisipliner PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Tahun 2017 BKD menargetkan jumlah kasus-kasus kepegawaian berupa pelanggaran disiplin PNS yang dapat terselesaikan/tertangani adalah 50 kasus.

d) Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin

Pada tahun 2016, Jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin sejumlah 35 PNS dari target 22 orang (63%). Salah satu penyebab tidak tercapainya target adalah meningkatnya jumlah kasus kepegawaian yang masuk ke BKD. Bahwa kasus kepegawaian yang dibahas di BKD merupakan kasus kepegawaian dalam tingkatan yang berat dan tidak dapat diselesaikan di internal Perangkat Daerah yang bersangkutan. Target kinerja ini merupakan target menurun, sehingga keberhasilan pelaksanaan kegiatan ditunjukkan dengan menurunnya realisasi dibandingkan dengan target.

Permasalahan yang dihadapi adalah peningkatan pemberian hukuman disiplin berdampak pada alokasi pelaksanaan sidang kasus oleh Baperjakat yang jumlahnya melebihi dari target yang telah ditetapkan.

Adapun rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya adalah penambahan pagu anggaran bagi kegiatan Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS yang akan dialokasikan untuk penambahan frekuensi sidang. Perlu adanya perubahan metode pelaksanaan sidang mengingat pelaksanaan sidang yang sudah berjalan saat ini, hanya dilaksanakan pada momen-momen tertentu sehingga pelaksanaannya sudah bisa diprediksi oleh para pegawai. Penambahan frekuensi sidang sangat diperlukan untuk memberikan efek kejutan.

e) Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya

Pada tahun 2016, indikator jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya sejumlah 1 pejabat dari target 6 orang. Pada saat penyusunan target, indikator kinerja ini menggunakan output Kegiatan Uji Kompetensi Calon Pejabat eselon II (Tes PCAP) yang bertujuan untuk membentuk talent pool. Setelah melalui evaluasi, output kegiatan ini dinilai sudah tidak efektif, selain itu UU ASN mensyaratkan pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama harus dilakukan menggunakan Seleksi Terbuka, sehingga output dari kegiatan ini sudah tidak layak lagi digunakan sebagai indikator kinerja.

Maka mulai tahun 2015, kegiatan Uji Kompetensi Calon Pejabat eselon II (Tes PCAP) dihapus dan diganti dengan kegiatan Rekrutmen Calon Pejabat Kabupaten Tegal. Dengan demikian, output indikator

kinerja Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya menggunakan jumlah peserta Seleksi Terbuka, yang pada tahap seleksinya (TAHAP 4) terdapat tahapan Penilaian Kompetensi oleh *Assesment Center*.

Rekomendasi dan rencana tindak lanjutnya adalah melalui inisiasi pembentukan *talent pool*, pola karier PNS, dan uji kompetensi bagi seluruh pejabat struktural sebagaimana dinyatakan dalam UU ASN. Pada tahun 2017 BKD akan melaksanakan Uji Kompetensi bagi Pejabat Struktural/Pengampu Jabatan Administrasi sebanyak 9 batch (54 orang).

f) Jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan)

BKD telah melaksanakan Kegiatan Penataan Jabatan Fungsional Khusus (JFK) dan Kegiatan Penataan Administrasi Mutasi, Evaluasi dan Alih Fungsi PNS pada tahun 2016 dengan realisasi sejumlah 34 jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan) dari target 12 orang dengan capaian kinerja 208%.

Permasalahan yang dihadapi adalah tuntutan dari PNS pengampu JFT terkait kesetaraan tambahan penghasilan, dan kurangnya perhatian dari Pemerintah Daerah terkait dengan diklat penjenjangan yang wajib diikuti oleh pengampu JFT tersebut.

Hal-hal yang perlu dilakukan untuk meningkatkan minat PNS menjadi pejabat fungsional :

- Menginisiasi pengaturan tambahan penghasilan bagi JFT.
- Mengakomodir diklat penjenjangan bagi pengampu JFT.

Sesuai dengan Hasil Rekapitulasi Jabatan ASN Tahun 2016 dan telah dilaporkan ke Kementerian PAN & RB melalui aplikasi e-formasi, kebutuhan pengampu JFT (selain guru/tenaga kesehatan) sejumlah 636 orang dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2.1

Jenis JFT Terampil dan JFT Ahli

JFT TERAMPIL					
NO.	NAMA JABATAN	ABK	ASN	KEADAAN ASN	
				KURANG	LEBIH
1	ANALIS KEPEGAWAIAN	2	-	2	-
2	ARSIPARIS	7	3	4	-
3	AUDITOR	9	4	5	-

4	INSTRUKTUR	6	6	-	-
5	PENGUJI KENDARAAN BERMOTOR	12	4	8	-
6	PENYULUH KB	52	52	-	-
7	PENYULUH KEHUTANAN	32	10	22	-
8	PENYULUH PERIKANAN	5	5	-	-
9	PENYULUH PERTANIAN	160	27	133	-
10	POLISI PAMONG PRAJA	210	62	148	-
11	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	3	3	-	-
12	PRANATA KOMPUTER	15	5	10	-
13	PRANATA LABORATORIUM	5	5	-	-
14	PUSTAKAWAN	2	4	-	2
15	SANDIMAN	2	2	-	-
JUMLAH JFT TERAMPIL		522	192	332	2
JFT AHLI					
1	ANALIS KEPEGAWAIAN	4	1	3	-
2	AUDITOR	43	7	36	-
3	AUDITOR KEPEGAWAIAN	5	1	4	-
4	INSTRUKTUR	38	20	18	-
5	MEDIATOR KETENAGAKERJAAN	3	-	3	-
6	PAMONG BUDAYA	1	1	-	-
7	PEKERJA SOSIAL	2	-	2	-
8	PENERA	2	-	2	-
9	PENGADAAN BARANG/JASA	1	-	1	-
10	PENGAMAT TERA	2	-	2	-
11	PENGANTAR KERJA	2	-	2	-
12	PENGAWAS KEMETROLOGIAN	2	-	2	-
13	PENGAWAS KETENAGAKERJAAN	5	3	2	-
14	PENGAWAS LINGKUNGAN HIDUP	2	1	1	-
15	PENGAWAS PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAH DI DAERAH (P2UPD)	48	8	48	-
16	PENGAWAS SEKOLAH	63	59	4	-
17	PENGAWAS SMA	2	1	1	-
18	PENGAWAS SMK	3	3	-	-
19	PENGAWAS SMP	9	6	3	-
20	PENGELOLA PENGADAAN B/J	3	-	3	-
21	PENGELOLA PENGENDALIAN OPT (ORGANISME PENGGANGGU TANAMAN)	1	1	-	-
22	PENGENDALI DAMPAK LINGKUNGAN	2	1	1	-
23	PENILIK SEKOLAH	50	48	2	-
24	PENYULUH KB	92	45	47	-
25	PENYULUH KEHUTANAN	11	3	8	-
26	PENYULUH PERIKANAN	6	1	5	-
27	PENYULUH PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN	10	4	6	-
28	PENYULUH PERTANIAN	127	57	70	-

29	PERANCANG PERPU	3	2	1	-
30	PERENCANA	9	5	4	-
31	POLISI PAMONG PRAJA	40	9	31	-
32	PRANATA HUBUNGAN MASYARAKAT	1	-	1	-
33	PRANATA KOMPUTER	7	5	2	-
34	STATISI	2	1	1	-
35	STATISTISI	1	1	-	-
	JUMLAH JFT AHLI	602	294	308	-

Tahun 2017 BKD menargetkan untuk dapat menambah jumlah Jabatan Fungsional Tertentu sebanyak 100 orang.

Grafik 2.4
Target dan Realisasi Jumlah jabatan fungsional baru
(non guru dan kesehatan) Tahun 2016



2. BERDASARKAN INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS (sesuai dengan Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019)

Sasaran BKD Kabupaten Tegal sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

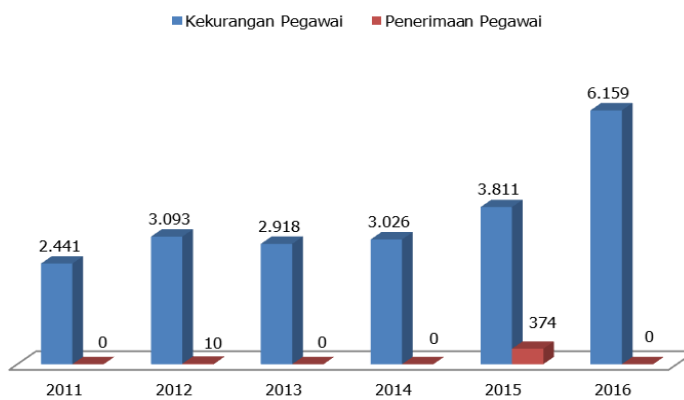
1) *Terdapatnya CPNS yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi organisasi.*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini sangat rendah yaitu sebesar 29% dibandingkan dengan capaian PPS tahun 2015 sebesar 98%. Hal ini karena ada beberapa indikator kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan :

- a. Sesuai dengan surat Menpan & RB Nomor : B/2163/M.PAN-RB/06/2015 tanggal 30 Juni 2015 berimbas pada tidak terlaksananya indikator kinerja lain yang saling berkaitan, yaitu : jumlah pegawai baru yang terpenuhi, penerapan metode CAT dalam seleksi penerimaan CPNS, jumlah terbitnya SK CPNS, periode penyerahan SK CPNS, penempatan CPNS berdasarkan formasi dan kompetensinya, jumlah usul tambahan PPPK serta jumlah PPPK yang terpenuhi.

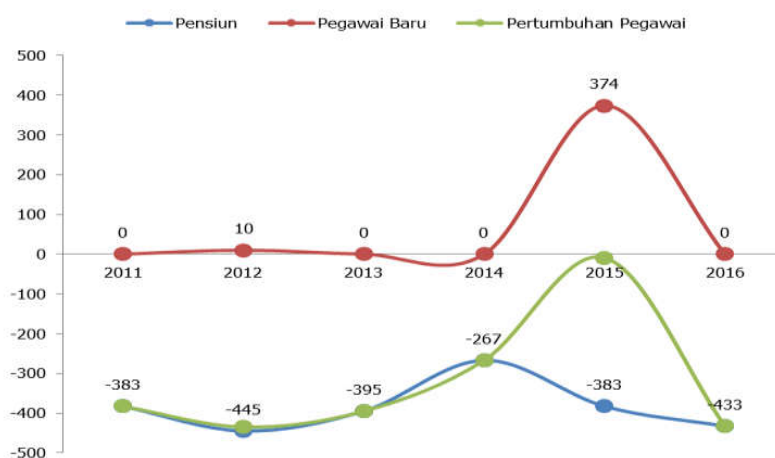
Beberapa solusi yang bisa diambil antara lain memaksimalkan distribusi pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal berdasarkan kompetensi masing-masing pegawai dan beban kerja masing-masing Perangkat Daerah. Peningkatan profesionalisme kerja pegawai dengan mendorong pegawai untuk menduduki Jabatan Fungsional Tertentu (JFT) yang diharapkan akan lebih meningkatkan kinerja pegawai sesuai dengan bidang tugas dan kompetensinya.

Grafik 2.5
Perbandingan Jumlah Kekurangan Pegawai dan
Penerimaan Pegawai Tahun 2011 s/d 2016



Pada Gambar 2, terlihat bahwa di Kabupaten Tegal kondisi pertumbuhan pegawai mengalami penurunan (*minus growth*), dimana jumlah penerimaan pegawai baru lebih sedikit jika dibandingkan dengan jumlah pegawai yang pensiun. Hal ini mengakibatkan kekurangan pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah di Kabupaten Tegal semakin meningkat.

Grafik 2.6
Minus Growth Pertumbuhan Pegawai
Tahun 2011 s/d 2016



- b. Indikator jumlah pelamar IPDN dan jumlah pelaksanaan seleksi penerimaan praja IPDN tidak dapat terlaksana sehubungan mulai tahun 2015, pemerintah kabupaten/kota tidak dilibatkan dalam proses seleksi.
- c. Usaha yang telah dilaksanakan oleh BKD sesuai dengan tugas pokok dan fungsi hanya sebatas mengusulkan pengurangan pagu anggaran kegiatan terkait pada perubahan APBD tahun 2016, serta mengarahkan Kepala Perangkat Daerah untuk lebih memanfaatkan sumber daya yang ada guna mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

2) *Terlaksananya optimalisasi distribusi pegawai berbasis kompetensi.*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini cukup baik yaitu sebesar 72% dibandingkan dengan capaian PPS pada tahun 2015 yaitu sebesar 108%.

Ada 2 (dua) indikator sasaran dengan capaian lebih dari 100% yaitu jumlah pelaksanaan mutasi wilayah kerja dengan capaian sebesar 150%. Dengan target 2 (dua) kali pelaksanaan mutasi wilayah kerja bagi JFU di tahun 2016, terlaksana sebanyak 3 (tiga) kali. Hal ini wajar, mengingat kebijakan pelaksanaan mutasi wilayah kerja merupakan kewenangan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Selain itu, indikator persentase PNS JFU yang dirotasi juga melebihi target yang telah ditetapkan. Dengan target sebesar 7%, tercapai sejumlah 15% dari total seluruh staf yang dirotasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Peningkatan persentase capaian ini dipengaruhi oleh adanya penarikan Sekretaris Desa yang berstatus PNS dari desa untuk di distribusikan ke seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.

Ada 3 indikator yang tidak dilaksanakan pada tahun 2016, yaitu tersusunnya dokumen redistribusi pegawai, jumlah pelaksanaan evaluasi mutasi JFU, dan pelaksanaan alih fungsi PNS. Hal ini disebabkan karena keterbatasan pagu anggaran pada tahun 2016. Adanya pembatasan berupa pagu indikatif per program menyebabkan Perangkat Daerah kurang bebas untuk berkreasi dan melakukan inovasi guna peningkatan pelayanan.

3) *Terlaksananya sistem merit dalam pengelolaan SDM aparatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini sangat minim yaitu sebesar 53% jika dibandingkan dengan capaian sasaran pada tahun 2015 yang mencapai 161%:

- a. Indikator pelaksanaan *assessment* bagi pejabat struktural tidak dilaksanakan sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran kegiatan. Hal ini juga terkait dengan mahalnya biaya pengiriman peserta *assessment*, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tegal belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga assesornya. Selain itu, titik berat pemerintah daerah masih cenderung kepada pembangunan fisik yang dapat langsung dilihat hasilnya, sehingga pembangunan SDM Aparatur masih belum mendapatkan perhatian. Hal ini wajar, mengingat masih banyak daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang membutuhkan perbaikan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal.
- b. Adapun indikator pelaksanaan evaluasi kompetensi jabatan struktural tidak kami masukkan ke dalam rata-rata persentase capaian kinerja mengingat indikator ini telah dilaksanakan oleh Bagian Organisasi pada Tahun 2015.
- c. Indikator AKD tidak ditargetkan untuk dilaksanakan pada Tahun 2016, namun dalam pelaksanaan Diklat AKD pada awal tahun 2016, peserta diminta untuk langsung menyusun dokumen AKD, sehingga indikator ini dapat terlaksana pada tahun 2016. Adapun capaian sasaran diasumsikan sebesar 100% mengingat indikator ini tidak ditargetkan untuk dilaksanakan pada tahun 2016.
- d. Untuk indikator terkait pelaksanaan seleksi terbuka bagi pejabat struktural, tidak dilaksanakan pada tahun 2016. Penjelasan dari capaian ini adalah bahwa kebijakan pelaksanaan pengangkatan dan pengisian jabatan struktural merupakan kewenangan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- e. Indikator Persentase jabatan struktural yang terisi berhasil dilaksanakan dengan capaian kinerja sebesar 99%.
- f. Sasaran ini masih memerlukan upaya ekstra keras untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Namun demikian, kebijakan pelaksanaan pengangkatan dan pengisian jabatan struktural merupakan kewenangan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam proses pelaksanaannya.

g. Indikator evaluasi kompetensi jabatan struktural dan seleksi jabatan terbuka eselon III dan IV diusulkan untuk dihapus di tahun 2017 melalui kegiatan review Renstra. Mengingat pada tahun 2015 dan 2016 capaiannya masih 0%, Pemerintah Kabupaten Tegal hanya melaksanakan seleksi terbuka untuk JPT Pratama (setara eselon II), serta ketersediaan pagu anggaran yang terbatas.

4) *Terlaksananya pengembangan dan penguatan jabatan fungsional.*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini cukup baik yaitu sebesar 63%, namun masih tertinggal jauh dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 (110%). Hal ini dipengaruhi oleh indikator sasaran sosialisasi Jabatan Fungsional Baru yang tidak dilaksanakan karena keterbatasan pagu anggaran kegiatan. Namun demikian, capaian indikator sasaran jumlah pejabat fungsional baru meningkat hampir 5 kali lipat dari target dengan capaian sebesar 486%.

Meskipun pada tahun 2016 tidak dilaksanakan sosialisasi, namun nampaknya minat menduduki jabatan fungsional tertentu perlahan mulai tumbuh di kalangan PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal. Dengan demikian, upaya yang perlu dilakukan oleh BKD pada tahun mendatang adalah mempertahankan nilai capaian dengan memperbaiki fasilitas yang dimiliki oleh para pengampu jabatan fungsional serta memberikan dukungan berupa mengakomodir diklat-diklat penjenjangan yang dibutuhkan para pengampu jabatan fungsional tertentu. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat jumlah kebutuhan JFT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih cukup banyak sebagaimana termuat dalam penyusunan kebutuhan ASN tahun 2016.

5) *Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat).*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini sangat baik yaitu sebesar 98%, namun masih tertinggal jauh dibandingkan dengan realisasi tahun 2015 yaitu 127% :

a. Diklatpim II direncanakan untuk tidak mengirimkan peserta pada tahun 2016, namun pada tahun 2015 terdapat 6 pejabat eselon II yang belum mengikuti Diklatpim II, sehingga alokasi dana untuk pengiriman peserta Diklatpim III dan Diklatpim IV dialihkan untuk pengiriman peserta Diklatpim II.

- b. Capaian indikator sasaran jumlah PNS BKD yang mengikuti bintek dan diklat teknis dan fungsional mencapai 180%.
- c. Indikator sasaran pengiriman diklat teknis AKD dan PPNS tidak dilaksanakan mengingat keterbatasan pagu anggaran. Selain itu pengiriman peserta diklat teknis AKD telah dilaksanakan melalui penyelenggaraan diklat teknis AKD yang difasilitasi oleh Badan Diklat Provinsi Jawa Tengah.
- d. Terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang petunjuk pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menyebutkan adanya kebijakan penarikan sekretaris desa dengan status PNS, mengakibatkan indikator sasaran Diklat Sekretaris Desa tidak dilaksanakan dan tidak mendapatkan alokasi anggaran.
- e. Surat Menpan & RB perihal Penundaan Penambahan Pegawai ASN Tahun 2015, berimbas pada target indikator sasaran jumlah CPNS yang mengikuti diklat prajabatan. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2015 Pemerintah Kabupaten Tegal tidak mendapatkan tambahan formasi CPNS Umum. Dengan demikian, BKD tidak melaksanakan pengiriman diklat prajabatan.

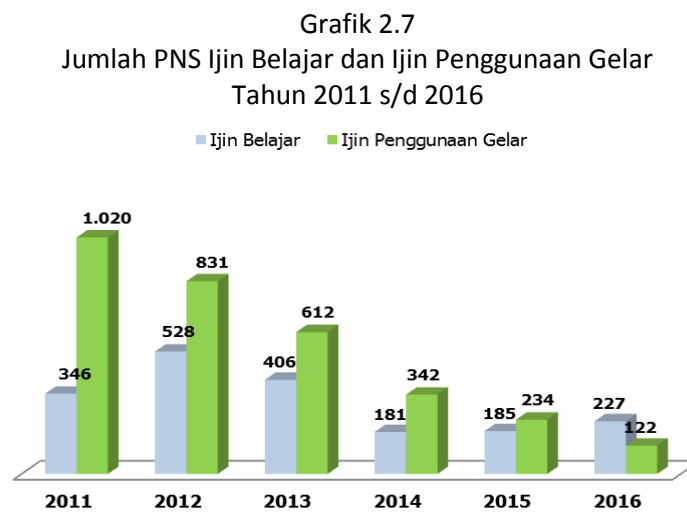
6) *Terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi.*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini sangat baik yaitu sebesar 97%, namun demikian masih dibawah capaian sasaran tahun 2015 yang mencapai 109%:

- a. Indikator sasaran tersusunnya pedoman pola karier PNS belum bisa dilaksanakan terkait keterbatasan pagu anggaran.
- b. Indikator sasaran jumlah pegawai yang memperoleh bantuan penelitian dan studi, jumlahnya dari tahun ke tahun mengalami penurunan. Hal ini bertolak belakang dengan jumlah pemohon izin belajar yang cenderung meningkat.
- c. Indikator sasaran Jumlah peserta ujian dinas dan jumlah peserta Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah (UKPPI) persentase capaiannya sudah cukup baik dari target yang telah ditetapkan. Namun tingkat kelulusan peserta sangat tidak memuaskan. dari 162 peserta Ujian Dinas dan UKPPI, tingkat kelulusan hanya mencapai 54%. Hal ini disebabkan

adanya perubahan paradigma dalam pelaksanaan ujian dinas, yang awalnya hanya menggunakan soal-soal dan lembar jawab komputer (LJK) berubah menggunakan media komputer sebagai sarana ujiannya. Penggunaan media komputer atau disebut Sistem Tes Menggunakan Media Komputer (TMMK) seperti halnya penggunaan CAT (*computer assisted test*) pada pelaksanaan tes CPNS. Sistem tes model ini lebih obyektif, transparan dan akuntabel serta cepatnya proses pemeriksaan dan pelaporan hasil ujian.

- d. Indikator sasaran Jumlah surat izin belajar capaian kerjanya mengalami penurunan. Namun jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya mengalami peningkatan. Lain halnya dengan peserta tugas belajar yang cenderung mengalami penurunan, dengan perbandingan 1 : 14. Jika tidak diantisipasi, maka pada beberapa tahun mendatang akan terjadi penumpukan PNS pada bidang pendidikan tertentu. Dan ketika fokus PNS tersebut pada jabatan struktural, maka akan terjadi antrean panjang untuk menduduki formasi jabatan struktural.



- 7) Tersedianya data kepegawaian dan data kompetensi pegawai yang aktual, akurat, dan siap saji sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian.

Rata-rata persentase capaian sasaran ini cukup baik yaitu sebesar 84% jika dibandingkan dengan tahun 2015 (74%). Namun demikian, ada beberapa indikator yang hanya mencapai 50% dan 1 indikator tidak dilaksanakan.

Indikator sasaran jenis output produk Simpeg dan Aplikasi Layanan Penilaian Kinerja (e-SKP) pelaksanaannya kurang maksimal sebagai akibat dari

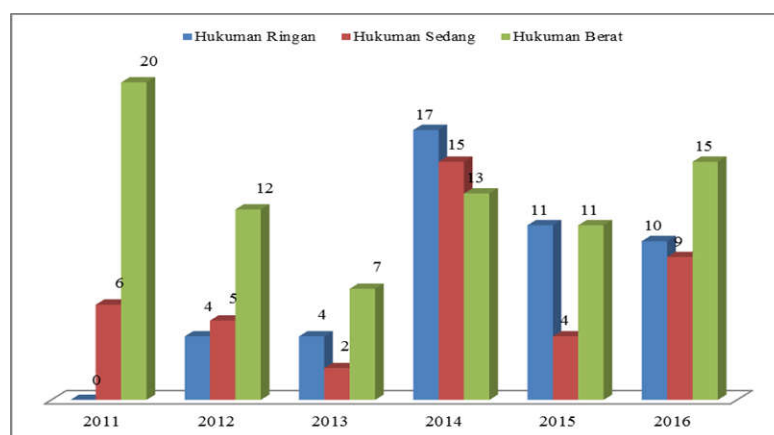
keterbatasan pagu anggaran kegiatan. Sedangkan untuk indikator sasaran jumlah arsip kepegawaian yang ditangani oleh BKD setiap tahun mengalami penurunan sebagai akibat dari moratorium penambahan pegawai ASN serta jumlah PNS yang pensiun.

8) *Terlaksananya pembinaan sikap mental pegawai.*

Persentase capaian sasaran ini sebesar 84% lebih baik dibandingkan tahun 2015 yang hanya mencapai 77%. Pada sasaran ini, sebagian dari indikator sasarannya adalah target negatif, dimana nilai capaian yang lebih rendah dari target yang ditetapkan akan semakin baik:

- a. Indikator sasaran jumlah kasus kepegawaian yang ditangani dan jumlah realisasi hukuman disiplin realisasinya melebihi target yang telah ditetapkan. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kedisiplinan PNS di Kabupaten Tegal menurun, mengingat target dari indikator sasaran ini merupakan target negatif. Dengan demikian, perlu adanya upaya yang lebih maksimal di bidang pembinaan disiplin pegawai untuk menekan jumlah kasus kepegawaian.

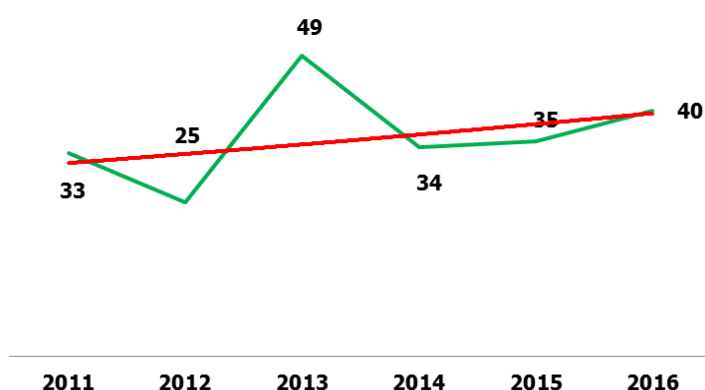
Grafik 2.8
Jumlah Hukuman Disiplin Berdasarkan Jenisnya
Tahun 2011 s/d 2016



- b. Indikator sasaran terkait pelaksanaan Sumpah PNS. Pesertanya merupakan CPNS formasi tahun 2014 dari Tenaga Honorer sejumlah 373 orang. Sedangkan pelaksanaan Diklat Kewiraan tidak dilaksanakan, karena tidak terakomodirnya kegiatan diklat ini pada penetapan maupun perubahan tahun 2016.

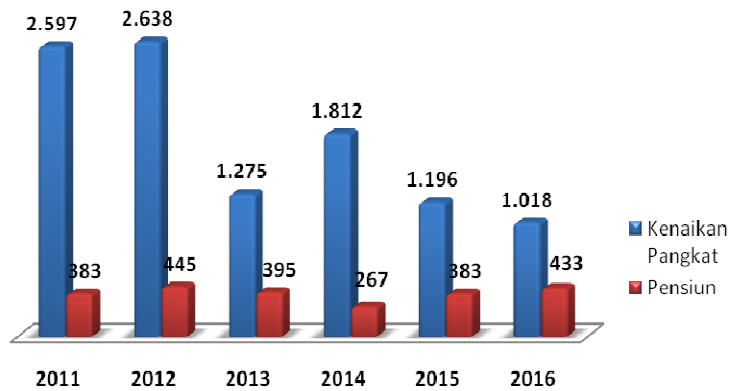
- c. Indikator pelaksanaan sidak, jumlah pegawai yang terjaring pada pelaksanaan sidak melebihi dari target yang ditetapkan. Hal ini menunjukkan adanya penurunan tingkat disiplin pegawai. Upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan teguran lisan dan tertulis kepada pegawai yang melanggar disiplin melalui Kepala Perangkat Daerah.
- d. Indikator sasaran terkait pembinaan perceraian, tingkat keberhasilan pembinaan mencapai 20%. Terlihat pada gambar di bawah, bahwa trend perceraian masih cenderung meningkat dari tahun ke tahun dengan angka lonjakan yang tidak terlalu signifikan sebagaimana terjadi pada tahun 2013. Hal ini menunjukkan bahwa pembinaan pelestarian perkawinan merupakan salah satu cara efektif dalam upaya menekan angka perceraian PNS.

Grafik 2.9
Jumlah Kasus Perceraian Tahun 2011 s/d 2016



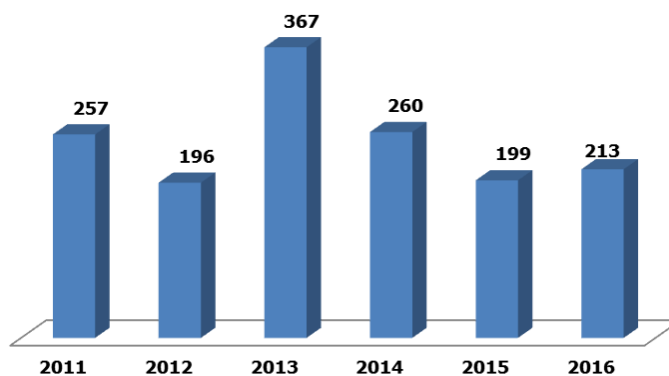
- e. Indikator sasaran jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya, terealisasi 5 orang dari 10 orang target yang telah ditetapkan dan telah ditindaklanjuti hasil pemeriksaannya secara tuntas pada tahun 2016 yang sebagian besar direkomendasikan untuk mengusulkan pensiun dini karena alasan kesehatan.
- 9) *Terwujudnya penghargaan dan peningkatan kesejahteraan bagi PNS.*
- Rata-rata persentase capaian sasaran ini menurun yaitu sebesar 63% jika dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2015 yang mencapai 78%.
- a. Indikator sasaran SK Kenaikan Pangkat dan Pensiun capaian kinerjanya cenderung menurun. Hal ini akibat dari moratorium sehingga jumlah pegawai yang semakin berkurang tidak dibarengi dengan penambahan pegawai baru.

Grafik 2.10
Jumlah PNS Penerima SKKP dan PNS Pensiun
Tahun 2011 s/d 2016



- b. Indikator sasaran terkait Peninjauan Masa Kerja tidak dilaksanakan karena semua PNS yang mengajukan PMK tidak memenuhi persyaratan yang telah ditentukan untuk mendapatkan tambahan masa kerja.
- c. Indikator sasaran pembekalan bagi PNS Purna Tugas dan pembinaan PTT nilai capaiannya masih rendah maupun tidak dilaksanakan disebabkan karena keterbatasan alokasi dana kegiatan, sehingga kegiatan ini tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- d. Indikator sasaran penerima Satya Lencana Karya Satya (SLKS), bahwa pengurusan SLKS melalui beberapa tahap verifikasi, mulai dari tingkat kabupaten, provinsi dan pusat. sehingga realisasi dari pengusulan SLKS ini sangat sulit untuk diprediksikan.

Grafik 2.11
Jumlah Penerima SLKS Tahun 2011 s/d 2016



- 10) *Terwujudnya pengendalian dan pengukuran kinerja kegiatan dari segi keluaran (output) dan hasil (outcome).*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini baik yaitu sebesar 100% sama dengan capaian pada tahun 2015. Hal ini wajar mengingat indikator sasaran didukung oleh kegiatan yang rutin dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

11) *Tercapainya peningkatan mutu sarana fisik.*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini menurun yaitu sebesar 74% jika dibandingkan dengan capaian pada tahun 2015 yang mencapai 133%. Hal ini wajar mengingat indikator sasaran didukung oleh kegiatan yang rutin dilaksanakan setiap tahun oleh Perangkat Daerah dan sangat bergantung terhadap pagu anggaran.

12) *Tersedianya sarana dan ruang bagi terbentuknya budaya belajar, berdiskusi, dan berpikir kritis di bidang kepegawaian.*

Rata-rata persentase capaian sasaran ini sedikit menurun yaitu sebesar 88% jika dibandingkan dengan nilai capaian tahun 2015 yang mencapai 99%. Hal ini wajar mengingat keberhasilan dalam pencapaian target kinerja sangat bergantung kepada ketersediaan pagu anggaran.

Adapun Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun 2016 pada BKD Kabupaten Tegal sebagaimana tersaji dalam tabel 2.1 berikut.

Tabel 2.2
Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2016

No	Program/Kegiatan	Target Renstra 2019	Target 2016	Realisasi 2016	Persentase Capaian %	Status Capaian
Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian						
<i>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</i>						
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	Sangat Tinggi
2	Penyediaan alat tulis kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	Sangat Tinggi
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	Sangat Tinggi
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	Sangat Tinggi
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	Sangat Tinggi

6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	60 bulan	12 bulan	12 bulan	00	Sangat Tinggi
7	Penyediaan makanan dan minuman	55 bulan	11 bulan	11 bulan	100	Sangat Tinggi
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	60 bulan	12 bulan	12 bulan	100	Tinggi
Program Peningkatan Sarana dan Praarana Aparatur						
9	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	6 unit	2 unit	2 unit	100	Sangat Tinggi
10	Pengadaan Mebelleir	10 unit	2 unit	2 unit	100	Sangat Tinggi
11	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	1 paket	1 paket	1 paket	100	Sangat Tinggi
12	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	7 mobil, 13 motor	7 mobil, 13 motor	7 mobil, 13 motor	100	Sangat Tinggi
13	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	18 unit AC	18 unit AC	18 unit AC	100	Sangat Tinggi
14	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	36 unit	36 unit	36 unit	100	Sangat Tinggi
15	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	17 unit	17 unit	17 unit	100	Sangat Tinggi
16	Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian	13.000 arsip	13.000 arsip	12.500 arsip	96,15	Sangat Tinggi
17	Pemeliharaan rutin/berkala Jaringan SIMPEG	5 kali	12.500 arsip	12.500 arsip	100	Sangat Tinggi
18	Pengadaan Aplikasi Layanan Terintegrasi	6 aplikasi	4 aplikasi	4 aplikasi	100	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Disiplin Aparatur						
19	Pengadaan Kartu Identitas Pegawai	16.500 kartu	1.100 kartu	1.100 kartu	100	Sangat Tinggi
20	Pengusulan Pembuatan Karpeg, Karis/Karsu, KPE	195 kartu	1.400 kartu	1.400 kartu	100	Sangat Tinggi
21	Pengadaan Alat Presensi Pegawai		147 unit	147 unit	100	Sangat Tinggi
22	Pengelolaan Presensi Pegawai	100%	12 bulan	3 bulan	25,00	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur						
23	Pendidikan dan pelatihan formal	75 orang	20 orang	26 orang	130	Sangat Tinggi
24	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	10 keg	1 keg 100 org	1 keg 100 org	100	Sangat Tinggi
25	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	00%	50 orang	0 orang	00	Sangat Tinggi

26	Pendidikan dan Pelatihan Fungsional bagi PNS Daerah	1.120 pst	Diklat AKD 80, diklat RM 129 org, Motv berprs 50 org, fungs 50	Diklat AKD 80, diklat RM 129 org, Motv berprs 50 org, fungs 50	100	Sangat Tinggi
27	Penerbitan Majalah Kepegawaian	1.250 eks	240 eks	240 eks	100	Sangat Tinggi
28	Pengadaan Buku Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan	100 buku	1 paket	1 paket	100	Sangat Tinggi
29	Rapat Koordinasi Kepegawaian	5 keg	1 keg	1 keg 130 pst	100	Sangat Tinggi
30	Pemeriksaan Kesehatan Aparatur Pemerintah	100 PNS	10 orang	10 orang	100	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan						
31	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	35 buku	11 jenis	11 jenis	100	Sangat Tinggi
32	Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	25 buku	5 buku	5 buku	100	Sangat Tinggi
33	Penatausahaan Adiminstrasi Pengelolaan barang milik daerah	5 jenis	1 jenis	1 jenis	100	Sangat Tinggi
Program Pengembangan Data/Informasi						
34	Penyusunan Data dan Informasi Perencanaan	100 buku	20 buku	20 buku	100	Sangat Tinggi
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama investasi						
35	Penyelenggaraan Pameran Investasi	5 keg.	1 keg	1 keg.	100	Sangat Tinggi
Program Kedinasan						
36	Pendidikan Penjenjangan Struktural	100 %	40 orang	32 orang	80,00	Tinggi
Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur						
37	Pengangkatan dan Penempatan CPNS Daerah	2.040 orang	500	0 orang	00	Sangat Rendah
38	Penataan Sistem Administrasi KPO PNS	13.100 sk	2.200 SK	1.018 SK	46,27	Sangat Rendah
39	Pembangunan/ Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian Daerah	9 jenis	Rakor 1x, update data 5 jns, produk simpeg 3 jns,	Rakor 1x, update data 5 jns, produk simpeg 3 jns,	100	Sangat Tinggi
40	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Yang Berprestasi	1.500 org	300 orang	300 orang	100	Sangat Tinggi
41	Proses Penanganan Kasus-Kasus Pelanggaran Disiplin PNS	116 kasus	48 orang	52 kasus	83,00	Tinggi

42	Pemberian Bantuan Tugas Belajar dan Ikatan Dinas	90 TB, 118 bant.	24 TB	13 TB	54%	Rendah
43	Seleksi Penerimaan Calon ASN	1.500 org	200 CPNS, 50 PPPK	0 orang	0	Sangat Rendah
44	Ujian Dinas dan Ujian Penyesuaian Kenaikan Pangkat	225 UD 730 UKPPI	90 orang	58 UD 104 UKPPI	180	Sangat Tinggi
45	Pangangkatan & Pengisian Jabatan Struktural	10 keg, 94%	6 keg	6 keg.	100	Sangat Tinggi
46	Penataan Sistem Administrasi Pensiun PNS	2.700 sk	500 SK	436 SK	87,20	Tinggi
47	Pembinaan Disiplin Pegawai	60 orang	22 orang	34 orang	63%	Rendah
48	Pemberian Penghargaan Bagi PNS Purna Tugas dan Pelepasan Kepala SKPD Purna Tugas	1.360 buah	213 buah	213 plakat	100	Sangat Tinggi
49	Penataan Sistem Administrasi Gaji PNS	6.600 SPTKGB	500 SPTKGB	590 SPTKGB	118	Sangat Tinggi
50	Pembekalan Bagi PNS Menjelang Purna Tugas	1.900 orang	300 orang	300 orang	100	Sangat Tinggi
51	Penataan Administrasi Mutasi, Evaluasi dan Alih Fungsi PNS	Mwk 10x, ev mut jfu 8x, alh fgs pns 9x	Mwk 2x, mut jfu 2x, alh fg pns 1x	Mwk 2x, mut jfu 2x, alh fg pns 1x	100	Sangat Tinggi
52	Pengelolaan LHKPN	38 dok	38 dok	38 dok	100	Sangat Tinggi
53	Pelantikan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Kepala Sekolah	9 pelaks.	1 pelaks.	1 pelaks.	100	Tinggi
54	Uji Kompetensi Pejabat Eselon II	63 orang	6 orang	1 orang	17,00	Rendah
55	Penataan Administasi Izin Melanjutkan Pendidikan, Izin Belajar, Surat Keterangan Penggunaan Gelar dan Tugas Belajar	1.750 IB 75 TB 250 IMP	350 IB, 5 TB	227 IB, 13 TB	67,61	Sedang
56	Pemeriksaan Kesehatan Bagi PNS Yang Terkena Sakit Menahun	40 org	5 orang	5 org	100	Sangat Tinggi
57	Pengelolaan dan Fasilitasi Pelayanan Administrasi Kepegawaian	3.500 kartu	40 kartu	40 kartu	100	Sangat Tinggi
58	Penataan Jabatan Fungsional Khusus (JFK)	47 fungs. baru	12 orang	34 orang	208%	Sangat Tinggi
59	Sinkronisasi Database SIMPEG dengan Database Penggajian	100 %	2 database	2 database	100	Sangat Tinggi
60	Penataan Sistem Ijin Penggunaan Gelar	60 pst assesmt	300 orang	122 ijin gelar	40,67	Sangat Rendah

61	Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan	15 orang	25 ijin perc.	27 ijin perc.	108	Sangat Tinggi
62	Penyusunan Formasi PNSD	5 bk Form PNSD, 10 bk dok akp, 10 bk dok ev. peg	10 buku	10 buku	100	Sangat Tinggi
63	Pengangkatan dan Pengambilan Sumpah PNS	2.040 orang	250 cpns	373 orang	149,20	Sangat Tinggi
64	Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	157 dok	140 orang	112 orang	80	Tinggi

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis Pencapaian kinerja pelayanan BKD Kabupaten Tegal pada dokumen ini didasarkan pada indikator sasaran yang terdapat dalam Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019. Hal ini disebabkan karena BKD bukan merupakan Perangkat Daerah pelayanan masyarakat umum, dengan demikian tidak diwajibkan untuk menyusun SPM. Sedangkan dalam IKK berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008, tidak disebutkan target yang harus dicapai oleh Perangkat Daerah, hanya berupa indikator kinerja guna mengukur capaian kinerja tanpa menunjukkan target ideal yang harus dicapai. Sekilas mengenai capaian kinerja BKD sesuai dengan IKK dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Jumlah Program Nasional yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah

Pada tahun 2016 BKD Kabupaten Tegal tidak melaksanakan Program Nasional (RKP) mengingat sumber pendanaan pelaksanaan program dan kegiatan berasal dari APBD Kabupaten Tegal.

2) Keberadaan *Standard Operating Procedure* (SOP)

BKD telah menyusun SOP pada tahun 2013 sesuai dengan Keputusan Kepala BKD nomor 060/1376.1/2013 tanggal 1 November 2013 tentang Stándar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal.

3) Jumlah Peraturan Daerah pelaksanaan yang ada terhadap Peraturan Daerah yang harus dilaksanakan menurut Peraturan Menteri

Sesuai dengan tupoksi, belum ada Perda yang harus dilaksanakan BKD menurut Peraturan Menteri.

- 4) Rasio struktur jabatan dan eselonering yang terisi
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, jumlah jabatan yang ada pada BKD sejumlah 17 Jabatan. Dari jumlah tersebut, seluruhnya terisi dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 5) Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi Perangkat Daerah
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah, terdapat 4 jabatan fungsional dalam struktur organisasi BKD. Adapun jabatan fungsional yang sudah terisi yaitu Analis Kepegawaian Pertama sejumlah 1 orang, Pranata Komputer Pelaksana sejumlah 3 orang dan Arsiparis Terampil 1 orang.
- 6) Rasio PNS BKD terhadap PNS Kabupaten
Rasio PNS BKD terhadap total PNS Kabupaten sebesar 1 : 203, dimana jumlah PNS BKD sebanyak 52 orang dan total PNS Kabupaten sebanyak 10.521 orang.
- 7) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan
Pejabat struktural di BKD yang memenuhi syarat untuk mengikuti diklatpim sesuai dengan tingkat dan jabatan, namun belum mengikuti sebanyak 3 orang, terdiri dari 1 orang pejabat eselon II (Diklatpim Tingkat II) dan 2 orang pejabat eselon III (Diklatpim Tingkat III) dengan capaian kinerja sebesar 17,65%.
- 8) Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan
Jumlah pejabat struktural yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan minimal dalam eselon yang diduduki sebanyak 17 orang dengan capaian kinerja sebesar 100%.
- 9) Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di Perangkat Daerah
dokumen perencanaan pembangunan di BKD yang disusun secara rutin setiap 5 tahunan dan tahunan yaitu :
 - a) Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2014-2019
 - b) Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016
 - c) Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2016
- 10) Jumlah Program RKPD yang tidak diakomodir dalam RENJA Perangkat Daerah
Program dalam RKPD yang menjadi kewajiban BKD sesuai dengan tupoksi yaitu :
 - a) Program Pendidikan Kedinasan
 - b) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

c) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur
Semuanya terakomodir dalam Renja Perangkat Daerah

- 11) Jumlah Program RENJA RKPd yang diakomodir dalam RKA Perangkat Daerah
Jumlah program pada Renja BKD Tahun 2016 yang diakomodir dalam RKA BKD Tahun 2016 sejumlah 8 program. Sedangkan jumlah program dalam RKA BKD Tahun 2016 sejumlah 8 program. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.
- 12) Jumlah Program RENJA Perangkat Daerah yang diakomodir dalam DPA Perangkat Daerah
Jumlah program pada Renja BKD Tahun 2016 yang diakomodir dalam DPA BKD Tahun 2016 sejumlah 8 program. Sedangkan jumlah program dalam DPA BKD Tahun 2016 sejumlah 8 program. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini sebesar 100%.
- 13) Anggaran Perangkat Daerah terhadap total belanja APBD
Jumlah Anggaran BKD Tahun 2016 sesuai dengan APBD Perubahan sebesar Rp. 10.006.813.000,- yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung sebesar Rp. 3.135.132.000,- dan Belanja Langsung sebesar Rp. 6.871.681.000,- Sedangkan jumlah total belanja APBD Kabupaten Tegal Tahun 2016 sebesar Rp. 2.358.383.968.812,- Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 0,42%.
- 14) Belanja modal terhadap total belanja Perangkat Daerah
Jumlah Belanja Modal Tahun 2016 sebesar Rp. 1.639.339.000,- dengan capaian kinerja indikator ini sebesar 7,13%.
- 15) Total Belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa
Jumlah Belanja Pemeliharaan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 296.930.000,- sedangkan jumlah total Belanja Barang dan Jasa BKD Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.166.797.000,- Dengan demikian, capaian kinerja indikator ini sebesar 7,13%.
- 16) Total Belanja pemeliharaan dari total belanja Perangkat Daerah
Jumlah Belanja Pemeliharaan Tahun 2016 sebesar Rp. 296.930.000,- dengan, capaian kinerja indikator ini sebesar 2,97%.
- 17) Keberadaan laporan keuangan Perangkat Daerah
Ada 5 (lima) jenis laporan keuangan pada BKD Kabupaten Tegal Tahun 2016 yang disusun pada akhir tahun anggaran, yaitu :
 - a) Neraca

- b) Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LRA)
 - c) Catatan Atas Laporan Keuangan (CALK)
 - d) Laporan Operasional (LO)
 - e) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 18) Keberadaan inventarisasi barang atau asset Perangkat Daerah
Inventarisasi barang atau asset di BKD tercatat pada Kartu Inventaris Barang (KIB).
- 19) Jumlah asset yang tidak digunakan oleh Perangkat Daerah
Sesuai dengan hasil inventarisasi barang tahun 2016, jumlah asset yang tidak digunakan, dalam hal ini digunakan kriteria pengadaan barang/jasa namun tidak digunakan/tidak dimanfaatkan adalah sebesar Rp. 0,- sedangkan jumlah total asset yang dikuasai oleh BKD sampai dengan Tahun 2016 adalah sebesar Rp. 4.976.416.860,-
- 20) Jumlah fasilitas / prasarana informasi
Jenis fasilitas/ prasarana informasi yang ada pada BKD Kabupaten Tegal yaitu :
- a) Situs Website *http://bkd.tegalkab.go.id/*.
 - b) Anjungan Kepegawaian
 - c) Banner
 - d) Struktur Organisasi
 - e) Papan Pengumuman
 - f) Majalah Kepegawaian (lentera)
 - g) Media Sosial (twitter).
- 21) Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat
Belum ada Survey Kepuasan Masyarakat atas pelayanan yang dilaksanakan oleh BKD pada Tahun 2016. Dengan pertimbangan bahwa pelayanan BKD hanya kepada masyarakat tertentu (pegawai) dan keterbatasan tenaga dan anggaran untuk melaksanakan survey.

Dengan demikian, analisis terhadap pencapaian indikator sasaran BKD Kabupaten Tegal berdasarkan Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) sebagaimana terlampir dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2016 dapat dijelaskan melalui Tabel Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal sebagaimana tersaji dalam tabel 2.3 berikut.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Beberapa isu penting dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi BKD Kabupaten Tegal dapat disebutkan sebagai berikut:

1. Minus growth PNS di Kabupaten Tegal, sebagai akibat dari adanya moratorium pengadaan pegawai. Hal ini berakibat pada kurangnya jumlah PNS baru dibandingkan dengan jumlah PNS yang pensiun setiap tahunnya. Hal ini juga mengakibatkan tidak seimbangnya beban kerja suatu Perangkat Daerah dengan keberadaan SDM yang ada di Perangkat Daerah tersebut. Hal ini akan mengakibatkan penurunan kinerja suatu Perangkat Daerah serta memicu penambahan rekrutmen tenaga kontrak atau sejenisnya yang kualitas SDM nya tidak terjamin.
2. Pelaksanaan assessment bagi pejabat struktural tidak dilaksanakan sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran. Hal ini juga terkait dengan mahalnya biaya pengiriman peserta assessment, sedangkan Pemerintah Kabupaten Tegal belum memiliki sarana dan prasarana yang memadai serta tenaga asesornya. Selain itu, titik berat pemerintah daerah masih cenderung kepada pembangunan fisik yang dapat langsung dilihat hasilnya, sehingga pembangunan SDM Aparatur masih belum mendapatkan perhatian. Hal ini wajar, mengingat masih banyak wilayah yang membutuhkan perbaikan infrastruktur guna meningkatkan perekonomian masyarakat Kabupaten Tegal.
3. Sasaran sosialisasi Jabatan Fungsional Baru yang tidak dilaksanakan sehubungan dengan keterbatasan pagu anggaran kegiatan. Namun demikian, capaian indikator sasaran jumlah pejabat fungsional baru meningkat hampir 5 kali lipat dari target yang telah ditetapkan. Meskipun pada tahun 2016 tidak dilaksanakan sosialisasi, namun nampaknya minat menduduki jabatan fungsional tertentu perlahan mulai tumbuh dikalangan PNS Pemerintah Kabupaten Tegal.
4. Menurunnya realisasi pengurusan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala dari tahun ke tahun. Hal ini merupakan akibat dari moratorium dimana jumlah pegawai yang semakin berkurang dari tahun ke tahun tidak dibarengi dengan penambahan pegawai baru.
5. Belum terwujudnya kebijakan Diklat Satu Pintu. Padahal diklat fungsional sangat dibutuhkan bagi para Pejabat Fungsional Tertentu dalam proses kepangkatannya. Namun demikian, dana diklat yang diserahkan ke masing-masing Perangkat Daerah yang notabene tidak memiliki tupoksi kediklatan, berakibat Perangkat

Daerah kurang *aware* dalam mengakomodir jenis diklat yang dibutuhkan oleh JFT, dan cenderung menghambur-hamburkan dana diklat. Hal ini terlihat dari kurang selektifnya Perangkat Daerah dalam memilih penawaran diklat dari pihak penyelenggara diklat.

6. Rendahnya tingkat disiplin PNS di Kabupaten Tegal dilihat dari meningkatnya penjatuhan hukuman disiplin.

Adapun solusi atau langkah di masa mendatang yang akan dilakukan oleh Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal untuk meningkatkan kinerja antara lain :

1. Upaya penyeimbangan antara belanja publik dengan belanja pegawai wajib dilaksanakan oleh pemerintah daerah yang merupakan syarat mutlak dalam upaya pemenuhan kekurangan pegawai. Pengoptimalan redistribusi pegawai pada masing-masing Perangkat Daerah, melalui pemetaan kompetensi individu pegawai. Adanya data mengenai kompetensi masing-masing individu akan lebih mempermudah dalam proses redistribusi pegawai dan mengurangi kesenjangan antar Perangkat Daerah. Selain itu hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ada dapat juga digunakan sebagai dasar dalam melaksanakan redistribusi pegawai.
2. Kebijakan pelaksanaan pengangkatan dan pengisian jabatan struktural merupakan kewenangan dari Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal serta membutuhkan biaya yang tidak sedikit dalam proses pelaksanaannya. Sehubungan dengan hal tersebut, dimungkinkan indikator evaluasi kompetensi jabatan struktural dan seleksi jabatan terbuka untuk eselon III dan IV diusulkan untuk dihapus pada tahun 2017 melalui kegiatan review Renstra. Mengingat pada tahun 2015 dan 2016 capaiannya masih 0%, Pemerintah Kabupaten Tegal hanya melaksanakan seleksi terbuka untuk JPT Pratama (setara eselon II), serta ketersediaan pagu anggaran yang terbatas.
3. Memperbaiki fasilitas yang dimiliki oleh para pengampu jabatan fungsional serta memberikan dukungan berupa mengakomodir diklat-diklat penjenjangan yang dibutuhkan para pengampu jabatan fungsional tertentu. Hal ini perlu dilaksanakan mengingat jumlah kebutuhan JFT di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal masih cukup banyak sebagaimana termuat dalam penyusunan kebutuhan ASN tahun 2016.

4. Peningkatan pemanfaatan sistem informasi (SAPK) untuk mewujudkan otomatisasi/ paperless pelayanan kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala sesuai dengan amanat Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 25 Tahun 2013 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Teknis Kenaikan Pangkat Reguler Pegawai Negeri Sipil Untuk Menjadi Pembina Tingkat I Golongan Ruang IV/b Ke Bawah.
5. Perlunya kebijakan pelaksanaan diklat satu pintu agar mempermudah bagi BKD selaku Perangkat Daerah pemegang tupoksi kediklatan dalam melaksanakan Manajemen ASN dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
6. Peningkatan disiplin di Kabupaten Tegal melalui penerapan absensi sidik jari yang di sinkronkan dengan pemberian tambahan penghasilan bagi PNS sebagai wujud penerapan azas *reward and punishment* pada tahun 2017. Selain itu, peningkatan frekuensi inspeksi mendadak juga wajib diterapkan untuk lebih meningkatkan disiplin PNS di Kabupaten Tegal.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Perangkat daerah dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Perangkat Daerah, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program/kegiatan dan pagu indikatif yang disediakan untuk setiap Perangkat Daerah berdasarkan rancangan awal RKPD.

Review terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program/kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program/kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program/kegiatan untuk Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Beberapa catatan penting hasil review terhadap rancangan awal RKPD (Renja) BKD Kabupaten Tegal sebagai berikut :

- a. Alokasi awal pagu anggaran untuk BKD tahun 2018 sebesar Rp. 5.605.000.000,- disampaikan pada Rapat Koordinasi Penyusunan Renja Perangkat Daerah Tahun 2018 pada tanggal 17 Januari 2017;
- b. BKD mengusulkan pagu anggaran sejumlah Rp. 12.782.700.000,- untuk tahun 2018 dan dirumuskan dan disetujui oleh stakeholder pada acara Forum Perangkat Daerah yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2017.

- c. Hasil akhir pagu anggaran untuk BKD yang telah disinkronisasi dengan RKPD Tahun 2018 adalah sebesar Rp. 9.313.000.000,- yang disampaikan pada acara Kegiatan sinkronisasi dan Penyesuaian Program/Kegiatan Rancangan Kerja (Renja) OPD Tahun 2018 pada tanggal 4 Mei 2017.

Adapun review terhadap rancangan awal RKPD (Renja) Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2018 sebagaimana tersaji dalam tabel 2.4 berikut.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Kajian usulan program dan kegiatan pada tahap ini adalah berasal dari usulan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari Perangkat Daerah kabupaten/kota yang langsung ditujukan kepada Perangkat Daerah provinsi maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi Perangkat Daerah provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten/kota (bila sudah dilakukan).

BKD Kabupaten Tegal sebagai OPD yang mempunyai kewenangan dibidang Kepegawaian, tidak melayani masyarakat umum secara langsung, sehingga program dan kegiatan yang diusulkan oleh masyarakat tidak ada. Program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh BKD adalah merupakan kegiatan rutin dibidang kepegawaian dan kegiatan yang mendukung kebijakan visi dan misi kepala daerah.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN BKD KABUPATEN TEGAL

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan bahwa Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Didalam RPJMN 2015-2025 disebutkan bahwa RPJMN III (RPJM 2015-2019) adalah tahap memantapkan pembangunan secara menyeluruh dengan menekankan pembangunan keunggulan kompetitif perekonomian yang berbasis Sumber Daya Alam yang tersedia, Sumber Daya Manusia yang berkualitas serta kemampuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi yang diarahkan kepada terwujudnya SMART ASN, yaitu ASN sebagai *human capital* yang profesional, handal, berintegritas, sejahtera dan mampu memberikan pelayanan publik yang lebih baik sebagaimana diamanatkan pada Nawa Cita.

Keberhasilan reformasi birokrasi sangat ditentukan oleh keberhasilan reformasi di bidang kepegawaian untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi melalui penataan sistem manajemen SDM aparatur. Sebagai instansi yang bertugas mengelola SDM aparatur di Kabupaten Tegal, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Daerah berupaya melaksanakan program tersebut dengan memberikan prioritas terhadap kegiatan-kegiatan yang mendukung suksesnya pelaksanaan program nasional tersebut.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

A. TUJUAN

Kondisi yang ingin dituju melalui Renja, sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam Review Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019, adalah :

1. Mewujudkan PNS yang berkompetensi tinggi sebagai dasar bagi terciptanya pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan basis data kepegawaian yang akurat yang dapat mendukung peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkualitas;
3. Meningkatkan pembinaan sikap mental pegawai dan terwujudnya penghargaan dan peningkatan kesejahteraan bagi PNS;

4. Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dan meningkatkan pengetahuan PNS dengan menyediakan sarana dan ruang bagi terbentuknya budaya belajar, berdiskusi, dan berpikir kritis di bidang kepegawaian;
5. Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas, terukur, dan transparan yang dapat mengeliminasi intervensi kepentingan, upaya-upaya KKN, dan praktik *rent seeking* dibidang kepegawaian.

B. SASARAN

Sasaran Renja tahun 2018 sesuai dengan tujuan yang telah dirumuskan dalam Review Renstra BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah sebagai berikut:

1. Terlaksananya sistem *merit* dalam pengelolaan SDM aparatur sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
2. Tersedianya data kepegawaian dan data kompetensi pegawai yang aktual, akurat, dan siap saji sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang kepegawaian;
3. Terlaksananya pembinaan sikap mental pegawai dan terwujudnya penghargaan dan peningkatan kesejahteraan bagi PNS;
4. Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan tersedianya sarana dan ruang bagi terbentuknya budaya belajar, berdiskusi, dan berpikir kritis di bidang kepegawaian;
5. Terwujudnya pengendalian dan pengukuran kinerja kegiatan dari segi keluaran (output) dan hasil (outcome) dan meningkatnya pelayanan administrasi perkantoran.

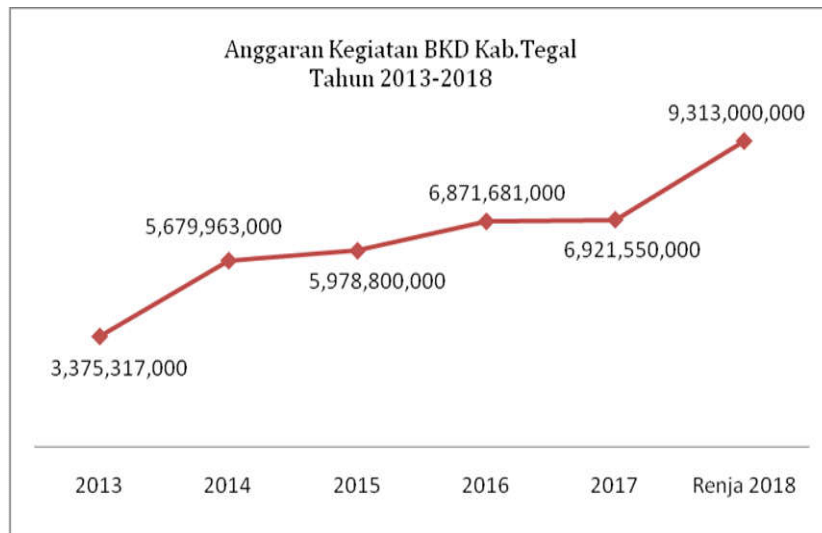
3.3. Program dan Kegiatan

A. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan perumusan program dan kegiatan

A.1. Faktor anggaran kegiatan

Dalam perumusan program dan kegiatan, faktor anggaran merupakan faktor yang menentukan. Dalam lima tahun terakhir terlihat bahwa pagu anggaran kegiatan BKD Kabupaten Tegal fluktuatif dan berada pada angka yang tidak pernah mencukupi untuk menyelenggarakan pembangunan kepegawaian yang optimal. Fenomena ini menyebabkan pencapaian sasaran-sasaran dalam Renstra menjadi sulit tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Grafik 3.1



Analisis pencapaian sasaran Renstra jika menggunakan target-target asli Renstra, dan bukan target yang direvisi, akan memperlihatkan hal tersebut (sebagai catatan, sub bab 2.2. mengenai Analisis Kinerja Pelayanan BKD Kabupaten Tegal sebagian besar pencapaiannya berada pada angka yang baik karena menggunakan target-target tahunan Renstra yang telah direvisi). Dengan demikian sasaran-sasaran lima tahun Renstra sebenarnya akan sangat sulit untuk tercapai, jika tidak mau dikatakan mustahil.

Anggaran yang fluktuatif dan cenderung menurun seharusnya tidak perlu menjadi masalah jika pagu yang ditetapkan tiap tahunnya mencukupi. Yang terjadi saat ini adalah: pagu yang ditetapkan terlalu kecil untuk bisa mengakomodir tupoksi BKD Kabupaten Tegal. Fenomena ini "memaksa" BKD Kabupaten Tegal untuk membuat skala prioritas kegiatan dan melakukan "rasionalisasi" anggaran dalam menentukan program dan kegiatan di tahun 2018.

A.2. Faktor pencapaian sasaran Rencana Strategis (Renstra)

Faktor ini merupakan faktor yang utama. Rencana Strategis (Renstra) BKD Kabupaten Tegal Tahun 2014-2019 adalah roh dari kegiatan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Tegal dalam jangka waktu lima tahun, dari 2014 hingga 2019. Dengan adanya Renstra maka BKD Kabupaten Tegal mempunyai arah filosofis yang pasti dalam menyelenggarakan pembangunan kepegawaian di Kabupaten Tegal. Renstra akan tetap menjadi acuan utama bagi BKD

Kabupaten Tegal dalam menentukan program dan kegiatan di tahun 2018 sekalipun anggaran tidak mendukung bagi pencapaian sasaran-sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

B. Garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

Garis besar Rumusan Rencana Program dan Kegiatan OPD Tahun 2018 dan Prakiraan Maju Tahun 2019 sebagaimana termuat dalam tabel 3.1 berikut.

BAB IV PENUTUP

Rencana Kerja BKD Kabupaten Tegal merupakan terjemahan dan operasional yang tercantum dalam program dan kegiatan dan merupakan program dan tahunan yang memuat berbagai kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran 2017 dan berkontribusi untuk pencapaian tujuan strategi jangka menengah yang tercantum dalam Rencana Strategis BKD Kabupaten Tegal tahun 2014-2019. Program dan kegiatan yang tertuang dalam Renja ini dirumuskan secara konkrit, disertai dengan rencana capaian program dan kegiatan yang memuat indikator *output* dan *outcome* yang jelas dan terukur sehingga pencapaian tujuan dan sasaran Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Tegal akan dapat berjalan secara efektif.

Harapan kami Rancangan Akhir Renja ini dapat dimanfaatkan sebagai pedoman dan acuan dalam menjalankan tugas sehari-hari bagi segenap PNS di jajaran BKD Kabupaten Tegal. Dengan memedomani Rancangan Akhir Renja, setiap pegawai di lingkungan BKD Kabupaten Tegal akan dapat mengetahui secara pasti apa yang menjadi tugas dan fungsi masing-masing, sehingga para pegawai akan dapat bekerja sesuai dengan target yang telah ditetapkan.

Akhirnya hanya dengan determinasi yang tinggi dan kerjasama yang baik dari seluruh komponen di lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan Dan Pelatihan Daerah Kabupaten Tegal, penyusunan Rancangan Akhir Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini akan dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan eksistensialnya. Demikian, semoga Rancangan Akhir Renja BKD Kabupaten Tegal Tahun 2018 ini dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya.

Slawi, 5 September 2017

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN,
PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH
KABUPATEN TEGAL



Drs. EPI BUDIYANTO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19610614 19801 1 001

Tabel 2.3
PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN DAERAH KABUPATEN TEGAL

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016	Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran							
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Telepon, Listrik, PDAM	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
2	Pengadaan alat tulis kantor	Tersedianya ATK	75 jenis	75 jenis	67 jenis	75 jenis	
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan	25 jenis	25 jenis	25 jenis	20 jenis	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 jenis	12 jenis	12 jenis	12 jenis	
5	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan kebersihan	24 jenis	24 jenis	22 jenis	25 jenis	
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	Tersedianya Surat kabar Nasional/Daerah	2,940 eks	2,940 eks	2,021 eks	3,350 jenis	
7	Penyediaan makanan dan minuman	Tersedianya Makanan dan Minuman Pegawai	54 peg.	54 peg	53 peg	53 peg	
8	Rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Tersedianya Biaya Perjalanan dinas luar daerah	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur							
	Pengadaan Kendaraan Dinas/operasional	Tercapainya Pengadaan kendaraan dinas	8 unit	2 unit	-	6 unit	
9	Pengadaan Mebeleur	lemari arsip	10 unit	2 unit	3 unit	3 unit	
10	Pemeliharaan rutin/ berkala gedung kantor	pemeliharaan gedung kantor	1 unit	1 unit	1 unit	1 unit	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016	Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan							
22	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	Laporan kinerja	20 jenis	11 jenis	3 jenis	3 jenis	
23	Penatausahaan dan Pelaporan administrasi keuangan daerah	honorarium penatausahaan keuangan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
Program Pengembangan Data/Informasi							
24	Penyusunan data dan informasi Perencanaan	data perencanaan	100 buku	40 buku	20 buku	5 buku	
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi							
25	Penyelenggaraan pameran investasi	pameran investasi	5 kali	2 kali	1 kali	1 kali	
Program Perencanaan Pembangunan Daerah							
26	Review Renstra SKPD	Jumlah Dok. Renstra			10 buku		
Program Pendidikan Kedinasan							
27	Pendidikan penjenjangan struktural	Jumlah Peserta Diklatpim	200 orang	56 orang	52 orang	46 orang	
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur							
28	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi CPNSD	Pengiriman peserta	480 orang	374 orang	-	252 orang	
29	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	pengiriman dan pelaksanaan diklat teknis dan fungsional	755 orang	347 orang	171 orang	100 orang	
30	Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS Daerah	pengiriman dan pelaksanaan diklat Teknis	365 orang	294 orang	20 orang	100 orang	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016	Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
31	Penerbitan majalah kepegawaian	majalah	1,250 eks	470 eks	225 eks	250 eks	
32	Pengadaan buku bacaan dan peraturan per UU an	buku	100 eks	40 eks	20 eks	20 eks	
33	Rapat koordinasi kepegawaian	rakor	5 kali	131 orang	115 orang	60 orang	
34	Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah	GCU	100 orang	29 orang	10 orang	10 orang	
35	Analisa Kebutuhan Diklat	Jumlah Dok. AKD			216 dok	48 do	
Program Pembinaan dan pengembangan Aparatur							
36	Penataan sistem administrasi kenaikan pangkat otomatis PNS	KP	10 kali	4 kali	1 kali	850 SK	
37	Pembangunan /pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	Produk Simpeg	9 jenis	12 jenis	3 jenis	3 jenis	
38	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	SLKS	1,500 orang	499 orang	300 orang	200 orang	
39	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	Jumlah kasus	116 kasus	98 kasus	50 kasus	50 kasus	
40	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	penerima bantuan	118 orang	30 orang	11 orang	5 orang	
41	Seleksi penerimaan calon ASN	CPNS & PPPK	1,500 orang		579 orang	579 orang	
42	pengangkatan dan penempatan CPNSD	SK CPNS	2,040 SK	374 SK	350 SK	579 SK	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016	Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
43	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	Ujian Dinas & UKPPI	955 orang	238 orang	90 orang	120 orang	
44	Pengangkatan dan Pengisian Jabatan Struktural	Pelaksanaan Pelantikan	10 kali	16 kali	5 kali	3 kali	
45	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	SK Pensiun	2,700 SK	819 SK	395 SK	418 SK	
46	Pembinaan Disiplin Pegawai	sidak	10 kali	4 kali	2 kali	2 kali	
47	Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas	plakat	1,360 plakat	431 plakat	209 plakat	230 plakat	
48	Penataan sistem administrasi gaji PNS	SPTKGB	6,600 SK	1,231 SK	1,000 SK	600 SK	
49	Pembekalan bagi PNS Menjelang purna Tugas	Pembekalan	10 kali	4 kali	300 orang	200 orang	
50	Penataan Administrasi Mutasi, Evaluasi dan Alih fungsi PNS	rotasi	10 SK	8 SK	4 SK	10 SK	
51	Pengelolaan LHKPN	LHKPN	38 dok	38 dok	38 dok	38 dok	
52	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah	pelantikan	9 kali	2 kali	1 kali	1 kali	
53	Uji Kompetensi Pejabat eselon II	pelaksanaan uji kompetensi	10 batch	1 batch		21 batch	
54	Penataan administrasi izin melanjutkan pendidikan, izin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar	SK IB dan TB	2,075 SK	433 SK	250 SK	203 SK	

No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Renstra SKPD pada Tahun 2014 s/d 2019 (periode renstra SKPD)	Realisasi capaian kinerja Renstra SKPD sampai dengan Tahun 2016	Proyeksi		Catatan Penting
					Tahun 2017	Tahun 2018	
1	2	3	4	5	6	7	8
55	Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun	Rekomendasi	40 orang	8 orang	5 orang	10 orang	
56	Pengelolaan dan Fasilitas Pelayanan Administrasi Kepegawaian	Pengelolaan SAPK Online	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 bulan	
57	Penataan Jabatan Fungsional Tertentu	SK JFT	2,300 SK	292 SK	650 SK	250 SK	
58	Sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian	Jumlah database	2 unit	2 unit	2 unit	2 unit	
59	Penataan sistem ijin penggunaan gelar	Penerbitan Surat Keterangan Penggunaan Gelar	1,500 orang	356 orang	200 orang	150 orang	
60	Pembinaan dan pelestarian perkawinan	Ijin Perceraian	15 SK	56 SK	25 SK	25 SK	
61	Penyusunan formasi PNSD	buku formasi	50 dok	20 dok	10 dok	10 dok	
62	Pengangkatan dan pengambilan sumpah PNS	SK Penegrian	2,040 orang	747 orang	- orang	252 orang	
63	Penataan administrasi dan pembinaan PTT	SK PTT	157 orang	112 orang	113 orang	101 orang	
64	Uji Kompetensi JPT Pratama, Administrator, dan Pengawas	pelaksanaan uji kompetensi	10 batch	1 batch	9 batch	21 batch	
65	Rekrutment Calon Pejabat Kabupaten Tegal	Seleksi JPT Pratama dan Camat			2 batch		
66	Evaluasi Paska Diklat	Evaluasi diklat terhadap alumni dan atasan			280 orang		
67	Penilaian dan Pemberian Penghargaan Kepada PNS Teladan	Seleksi PNS teladan level OPD, Kabupaten			1 paket		

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan SKPD

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Penanggungjawab	Target Kinerja		
						2015	2016		2017	2018	2019
1.	Mewujudkan PNS yang berkompentensi sebagai dasar bagi terciptanya pemerintahan yang baik	Terdapatnya CPNS yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi organisasi	Prosentase Jumlah kebutuhan pegawai baru yang terpenuhi;	Jumlah CPNS dan PNS Mutasi masuk / jumlah usulan kebutuhan pegawai baru x 100 %	%				10	11	12
			Prosentase Penerapan metode CAT dalam seleksi penerimaan CPNS.	Jumlah peserta seleksi CPNS dengan metode CAT / jumlah peserta seleksi CPNS x 100%	%				100	100	100
			Jumlah terbitnya SK CPNS	Jumlah terbitnya SK CPNS	SK/orang	374	-	mutasi	1400	1700	2000
			Periode penyerahan SK CPNS;	Jumlah kegiatan penyerahan SK CPNS	kali				2	2	2
			prosentase Penempatan CPNS berdasarkan formasi dan kompetensinya.	Jumlah SPT Penempatan CPNS sesuai dengan formasi x jumlah SPT penempatan CPNS X 100%	%				100	100	100
			Tersusunnya buku formasi PNSD;	Jumlah buku formasi PNSD	buku	10	10	mutasi	10	10	10
			Tersusunnya dokumen evaluasi pengadaan pegawai.	Jumlah dokumen evaluasi pengadaan pegawai	buku				10	10	10
			Jumlah terbitnya SK PNS;	Jumlah terbitnya SK PNS	SK	-	373	mutasi	500	500	500
			Periode Penyerahan SK PNS;	Jumlah kegiatan penyerahan SK PNS	kali				1	1	1
			Persentase Pengangkatan CPNS menjadi PNS.	Jumlah SK PNS / Jumlah CPNS X 100%	%				100	100	100
		Terlaksananya optimalisasi distribusi pegawai berbasis kompetensi	Persentase PNS JFU/Pelaksana yang dirotasi	Jumlah PNS Pelaksana yang dirotasi / jumlah PNS Pelaksana x 100%	%				9	11	13
			Jumlah pelaksanaan mutasi JFU	Jumlah pelaksanaan mutasi JFU	kali	2	2	mutasi	2	2	2
			Jumlah Pelaksanaan mutasi wilayah kerja (mutasi keluar)	Jumlah pelaksanaan mutasi wilayah kerja (mutasi keluar)	kali	2	2	mutasi	2	2	2
			Pelaksanaan Alih Fungsi PNS	Pelaksanaan Alih Fungsi PNS	kali	1	1	mutasi	2	2	2
		Terlaksananya sistem merit dalam pengelolaan SDM Aparatur sesuai dengan perturan perundang-undangan	Persentase OPD yang telah menyampaikan dokumen AKD	Jumlah OPD yang menyampaikan dokumen AKD / jumlah OPD x 100%	%				50	75	100
			Dokumen evaluasi hasil diklat	Jumlah dokumen evaluasi hasil diklat	dokumen	-	-	diklat	-	25	50
			Persentase OPD yang telah menyampaikan dokumen evaluasi hasil diklat	Jumlah OPD yang menyampaikan dokumen evaluasi hasil Diklat / jumlah OPD x 100%	%				-	25	50
			Rakor Sinkronisasi Program Diklat	Jumlah rakor sinkronisasi hasil diklat	kali				1	1	1
			Jumlah Pelaksanaan Pengangkatan dan pengisian jabatan struktural;	Jumlah pelaksanaan pelantikan	kali				10	10	10

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Penanggungjawab	Target Kinerja		
						2015	2016		2017	2018	2019
			Persentase jabatan struktural yang terisi	jumlah jabatan struktural yang terisi / jumlah jabatan struktural x 100%	%	92	93	bankir	94	94	94
			Persentase Jabatan Eselon II yang diisi menggunakan metode promosi terbuka	Jumlah Jabatan eselon II yang terisi dengan promosi terbuka / jumlah jabatan eselon II x 100%	%				40	60	75
			Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya	Jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya	orang	11	1	bankir	6	30	6
			Jumlah pelaksanaan Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah	Jumlah pelaksanaan pelantikan Kepala Sekolah	kali				2	2	2
			Persentase jabatan kepala sekolah yang terisi	jumlah jabatan kepala sekolah yang terisi dibagi jumlah jabatan kepala sekolah x 100%	%	95	95	bankir	100	100	100
			Jumlah pejabat fungsional baru	Jumlah pejabat fungsional baru (non guru dan non kesehatan)	orang	6	34	bankir	21	32	43
		Terlaksananya pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Jumlah pegawai Tugas Belajar	Jumlah pegawai tugas belajar	orang	27	13	bankir	24	21	24
			Jumlah pegawai yang memperoleh bantuan penelitian dan studi	Jumlah pegawai yang memperoleh bantuan penelitian dan studi	orang				24	24	24
			Jumlah Peserta Ujian Dinas	Jumlah peserta ujian dinas	orang	24	58	diklat	45	43	40
			Jumlah Peserta UKPPI	jumlah peserta UKPPI	orang	52	104	diklat	150	175	200
			Persentase kelulusan peserta ujian	jumlah peserta lulus ujian dinas dan UKPPI / jumlah peserta ujian dinas dan UKPPI x 100%	%			diklat	90	90	90
			Jumlah terbitnya surat izin melanjutkan pendidikan	Jumlah terbitnya surat izin melanjutkan pendidikan	dokumen			diklat	50	50	50
			Jumlah terbitnya surat izin belajar	Jumlah terbitnya surat izin belajar	dokumen	366	227	diklat	200	200	200
			Jumlah terbitnya surat keterangan penggunaan gelar	Jumlah terbitnya surat keterangan penggunaan gelar	dokumen	228	122	diklat	200	200	200
			Persentase tingkat kelulusan PNS yang melanjutkan pendidikan sesuai dengan alokasi waktu yang telah ditentukan	Jumlah PNS yang lulus tepat waktu / jumlah PNS yang lulus x 100%	%				100	100	100
2.	Mewujudkan basis data kepegawaian yang akurat yang dapat mendukung peningkatan pengelolaan administrasi kepegawaian yang berkualitas	Tersedianya data kepegawaian dan data kompetensi pegawai yang aktual, akurat, dan siap saji sebagai bahan pengambilan kebijakan di bidang	Jenis <i>output</i> produk Simpeg	Jumlah output produk simpeg	jenis	3	3	mutasi	9	9	9
			Terpeliharanya software dan hardware jaringan SIMPEG	Jumlah paket pemeliharaan software dan hardware jaringan SIMPEG	paket	1	1	mutasi	1	1	1
			Jumlah kegiatan sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian	Jumlah kegiatan sinkronisasi database SIMPEG dengan database penggajian	kali	12	12	mutasi	100	100	100
			Aplikasi Arsip Pegawai Digital (e-Filling)	Jumlah aplikasi e-filling	paket	-	1	mutasi	-	-	-

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Penanggungjawab	Target Kinerja		
						2015	2016		2017	2018	2019
		kepegawaian	Aplikasi Mutasi Pegawai (e-Mutasi)	Jumlah aplikasi e-mutasi	paket	-	1	mutasi	-	-	-
			Aplikasi Pengelolaan Diklat (e-Diklat)	Jumlah aplikasi e-diklat	paket	-	1	mutasi	-	-	-
			Aplikasi Layanan data pegawai untuk pimpinan (e-Pimpinan)	Jumlah aplikasi e-pimpinan	paket	-	1	mutasi	-	-	-
			Aplikasi Layanan Penilaian Kinerja (e-SKP)	Jumlah aplikasi e-SKP	paket	-	-	mutasi	-	-	1
			Aplikasi Layanan Karis, Karsu, Karpeg dan Cuti Pegawai (e-Dokbin)	Jumlah aplikasi e-Dokbin	paket	-	1	mutasi	-	-	-
								mutasi			
			Jumlah arsip kepegawaian yang dipelihara	jumlah arsip kepegawaian yang dipelihara	arsip	12,500	12,500	mutasi	11,000	10,500	10,500
			Pengelolaan/pemeliharaan Aplikasi SAPK	jumlah bulan pengelolaan/pemeliharaan aplikasi SAPK	bulan	12	12	bankir	12	12	12
3.	Meningkatkan pembinaan sikap mental pegawai dan terwujudnya penghargaan dan peningkatan kesejahteraan bagi PNS	Terlaksananya pembinaan sikap mental pegawai	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	Jumlah kasus kepegawaian yang ditangani	kasus	46	52	binkes	45	43	40
			Jumlah sidang tim penyelesaian kasus kepegawaian	Jumlah sidang Tim Penyelesaian Kasus	kali				4	4	4
			Jumlah realisasi hukuman disiplin	Jumlah realisasi hukuman disiplin	kasus	26	34	binkes	22	21	20
			Jumlah pelaksanaan sumpah PNS	Jumlah kegiatan sumpah PNS	kali				1	1	1
			Jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	Jumlah CPNS yang disumpah menjadi PNS	orang		373	binkes	350	500	500
			Persentase PNS yang mengikuti sumpah	Jumlah CPNS yang mengikuti sumpah PNS / jumlah CPNS yang menjadi PNS x 100%	%				100	100	100
			Jumlah Pelaksanaan Sidak	Jumlah pelaksanaan Sidak	kali	2	2	binkes	2	2	2
			Jumlah pegawai yang melanggar disiplin	Jumlah pegawai yang melanggar disiplin	orang			binkes	12	10	8
			Persentase tindak lanjut hasil sidak	Jumlah pegawai yang melanggar disiplin yang dilakukan pembinaan / jumlah pegawai yang melanggar disiplin x 100%	%				80	90	100
			Terbitnya ijin perceraian	Jumlah terbitnya ijin perceraian	SK	27	27	binkes	25	20	15
			Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan pelestarian perkawinan	Jumlah PNS yang mengikuti pembinaan pelestarian perkawinan	orang	27	27	binkes	25	20	15
			Jumlah pencetakan Kartu Identitas Pegawai	Jumlah kartu identitas pegawai dicetak	buah	1,476	1,100	mutasi	1,500	1,500	1,500
			Persentase tersedianya Kartu Identitas Pegawai	jumlah kartu identitas pegawai yang sudah dicetak/jumlah pegawai x 100%	%				28	28	28
			Realisasi pengusulan karpeg	Jumlah Karpeg yang terealisasi	kartu	211	164	mutasi	350	500	500
			Realisasi pengusulan karis/karsu	Jumlah Karis/Karsu yang terealisasi	kartu	423	350	binkes	55	60	65
			Realisasi pengusulan KPE	Jumlah KPE yang terealisasi	kartu	212	186	mutasi	350	500	500
			Penatausahaan presensi	Jumlah bulan penatausahaan presensi	bulan	-	3	mutasi	12	12	12

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Penanggungjawab	Target Kinerja			
						2015	2016		2017	2018	2019	
			Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS	Persentase rata-rata tingkat kehadiran PNS	%			mutasi				
			Jumlah Laporan LHKPN	Jumlah laporan LHKPN	dokumen	38	38	binkes	38	38	38	
			Jumlah pelaksanaan Bintek pengisian laporan LHKPN	Jumlah kegiatan Bintek Pengisian LHKPN	kali				1	1	1	
			Persentase Laporan LHKPN yang terkirim	Jumlah laporan LHKPN / Jumlah pejabat yang wajib LHKPN X 100%	%				100	100	100	
			Jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya	Jumlah PNS sakit menahun yang diperiksa kesehatannya	orang	3	5	binkes	8	6	4	
	terwujudnya penghargaan dan peningkatan kesejahteraan bagi PNS		Jumlah terbitnya SK KP;	Jumlah terbitnya SK KP;	SK	1,679	1,018	mutasi	1,500	1,500	1,500	
			Jumlah SK KP yang difasilitasi;	Jumlah SK KP yang difasilitasi;	SK				3,000	3,000	3,000	
			Periode penyerahan SK KP	Periode penyerahan SK KP	kali				2	2	2	
			Persentase penerapan KP reguler otomatis	Persentase penerapan KP reguler otomatis	%				100	100	100	
			Rapat Koordinasi dan Evaluasi KP	Rapat Koordinasi dan Evaluasi KP	kali				2	2	2	
				Jumlah terbitnya SK Pensiun	Jumlah terbitnya SK Pensiun	SK	251	436	mutas	500	500	500
				Periode Penyerahan SK Pensiun	Periode Penyerahan SK Pensiun	kali				4	4	4
				Jumlah terbitnya SPT KGB	Jumlah terbitnya SPT KGB	SPT	641	590	mutasi	750	700	650
				Persentase Penerapan Pengusulan KGB otomatis	Persentase Penerapan Pengusulan KGB otomatis	%				100	100	100
				Jumlah peserta pembekalan bagi PNS Purna Tugas	Jumlah peserta pembekalan bagi PNS Purna Tugas	orang	252	212	binkes	340	340	340
				Jumlah pelaksanaan pembekalan bagi PNS Purna Tugas	Jumlah pelaksanaan pembekalan bagi PNS Purna Tugas	kali				2	2	2
				Penerbitan Surat Perpanjangan Kontrak PTT	Jumlah PTT yang diterbitkan Surat Perpanjangan Kontrak	PTT	-	112	binkes	110	110	110
				Jumlah pelaksanaan pembinaan PTT	Jumlah pelaksanaan pembinaan PTT	kali	-	1	binkes	1	1	1
				Penerbitan SK Mutasi, Impassing Gaji, dan Pensiun PTT	Penerbitan SK Mutasi, Impassing Gaji, dan Pensiun PTT	SK				157	157	157
				Jumlah PNS yang diusulkan menerima SLKS	Jumlah PNS yang diusulkan menerima SLKS	orang			binkes	300	300	300
				Jumlah penerima SLKS	Jumlah penerima SLKS	orang	199	300	binkes	280	280	280
			Jumlah penghargaan yang diberikan kepada PNS Purna Tugas	Jumlah penghargaan/plakat yang diberikan kepada PNS Purna Tugas	buah	252	213	binkes	340	340	340	
			Pelaksanaan penyerahan penghargaan kepada PNS Purna Tugas	Pelaksanaan penyerahan penghargaan kepada PNS Purna Tugas	kali				4	4	4	
			Pelaksanaan pelepasan Kepala SKPD Purna Tugas	Pelaksanaan pelepasan Kepala SKPD Purna Tugas	kali				1	1	1	

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Penanggungjawab	Target Kinerja		
						2015	2016		2017	2018	2019
			Jumlah pejabat eselon II dan III yang diperiksa kesehatannya	Jumlah pejabat eselon II dan III yang diperiksa kesehatannya	orang	19	10	binkes	20	20	20
4.	Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi Pegawai melalui pendidikan dan pelatihan dan meningkatkan pengetahuan PNS dengan menyediakan sarana dan ruang bagi terbentuknya budaya belajar, berdiskusi, dan berpikir kritis di bidang kepegawaian	Terwujudnya peningkatan dan pengembangan kompetensi pegawai melalui pendidikan dan pelatihan (diklat) dan	Jumlah Pejabat yang mengikuti diklatpim II	Jumlah Pejabat yang mengikuti diklatpim II	orang	-	6	diklat	-	4	4
			Jumlah Pejabat yang mengikuti diklatpim III	Jumlah Pejabat yang mengikuti diklatpim III	orang	3	5	diklat	5	10	10
			Jumlah Pejabat yang mengikuti diklatpim IV	Jumlah Pejabat yang mengikuti diklatpim IV	orang	21	21	diklat	35	26	26
			Jumlah Dokumen AKD;	Jumlah dokumen AKD	dokumen	-	-	diklat	54	54	54
			Jumlah Dokumen Evaluasi Paska Diklat	Jumlah Dokumen Evaluasi Paska Diklat	dokumen	-	-	diklat	54	54	54
			Jumlah PNS BKD yang mengikuti Diklat Formal	Jumlah PNS BKD yang mengikuti Diklat Formal	orang	0	26	orang	30	30	30
			Jumlah PNS yang mengikuti BinteK dan Diklat Teknis:	Jumlah PNS yang mengikuti BinteK dan Diklat Teknis:	orang	223	324	diklat	60	65	70
			Jumlah PNS yang mengikuti BinteK dan Diklat Fungsional:	Jumlah PNS yang mengikuti BinteK dan Diklat Fungsional:	orang	28	50	diklat	30	35	40
			Prosentase Jumlah CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan.	Prosentase Jumlah CPNS yang mengikuti diklat pra jabatan.	%	100	-	diklat	100	100	100
			Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah peserta sosialisasi peraturan perundang-undangan	orang	100	100	binkes	100	100	100
			Jumlah sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah sarana sosialisasi peraturan perundang-undangan	buku				100	100	100
		tersedianya sarana dan ruang bagi terbentuknya budaya belajar, berdiskusi, dan berpikir kritis di bidang kepegawaian	Pelaksanaan penerbitan Majalah Kepegawaian:	Pelaksanaan penerbitan Majalah Kepegawaian:	kali				1	1	1
			Jumlah penerbitan Majalah Kepegawaian	Jumlah penerbitan Majalah Kepegawaian	eksemplar	230	240	sekretariat	250	250	250
			Bertambahnya koleksi buku perpustakaan kantor.	Bertambahnya koleksi buku perpustakaan kantor.	buku	20	20	sekretariat	20	20	20
			Jumlah peserta rakor kepegawaian;	Jumlah peserta rakor kepegawaian;	orang	110	130	sekretariat	130	130	130
			Jumlah sarana rakor kepegawaian	Jumlah sarana rakor kepegawaian	buku				100	100	100
			Penyelenggaraan pameran layanan kepegawaian	Penyelenggaraan pameran layanan kepegawaian	kali	1	1	sekretariat	1	1	1
5.	Mewujudkan pelayanan kepegawaian yang berkualitas, terukur, dan transparan yang dapat mengeliminasi intervensi kepentingan, upaya-upaya KKN, dan praktik rent	Terwujudnya pengendalian dan pengukuran kinerja kegiatan dari segi keluaran (output) dan hasil (outcome)	Pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD	Pelaksanaan penyusunan Renstra SKPD	kali				-	-	1
			Jumlah dokumen Renstra SKPD	Jumlah dokumen Renstra SKPD	buku	-	-	sekretariat	-	-	10
			Jumlah dokumen LAKIP SKPD	Jumlah dokumen LAKIP SKPD	buku	6	5	sekretariat	5	5	5
			Jumlah dokumen Pendamping LAKIP SKPD	Jumlah dokumen Pendamping LAKIP SKPD	jenis				4	4	4
			Jumlah laporan keuangan SKPD	Jumlah laporan keuangan SKPD	buku	5	5	sekretariat	5	5	5

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Penanggungjawab	Target Kinerja		
						2015	2016		2017	2018	2019
	seeking dibidang keuangan		Jumlah laporan administrasi barang SKPD	Jumlah laporan administrasi barang SKPD	jenis				5	5	5
			Jumlah dokumen penyusunan data dan informasi perencanaan semesteran	Jumlah dokumen penyusunan data dan informasi perencanaan semesteran	buku	20	20	sekretariat	20	20	20
			Pelaksanaan Pengendalian operasional kegiatan	Pelaksanaan Pengendalian operasional kegiatan	kali	1	1	sekretariat	4	4	4
			Jumlah dokumen Renja SKPD	Jumlah dokumen Renja SKPD	buku	5	5	sekretariat	5	5	5
			Jumlah dokumen RKA SKPD	Jumlah dokumen RKA SKPD	buku	5	5	sekretariat	5	5	5
			Jumlah dokumen DPA SKPD	Jumlah dokumen DPA SKPD	buku	5	5	sekretariat	5	5	5
			Jumlah pelaksanaan Forum SKPD	Jumlah pelaksanaan Forum SKPD	kali	1	1	sekretariat	1	1	1
		meningkatkan pelayanan administrasi perkantoran	Terpenuhinya kendaraan dinas (sepeda motor)	Jumlah kendaraan dinas baru (sepeda motor)	unit	-	2	sekretariat	-	-	-
			1) Mobil dinas	1) Mobil dinas					-	1	-
			2) Sepeda motor dinas	2) Sepeda motor dinas					-	-	-
	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor		Jumlah perlengkapan gedung kantor	paket	-	-	sekretariat	1	1	1	
	1) AC		1) AC					4	5	-	
	2) Gordyn		2) Gordyn					-	-	-	
	3) sound system		3) sound system					-	-	-	
	2) microphone		2) microphone					1	1	-	
	Terpenuhinya kebutuhan mebeleur gedung kantor		Jumlah mebeleur gedung kantor	unit	-	2	sekretariat	7	5	5	
	1) meja kursi kantor		1) meja kursi kantor					5	5	5	
	2) meja kursi rapat	2) meja kursi rapat									
	3) meja kursi tamu	3) meja kursi tamu									
	4) kursi lipat	4) kursi lipat									
	5) almari arsip	2) almari arsip					-	2			
	Terpenuhinya Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kebutuhan komputer dan printer	Jumlah tambahan Peralatan dan Perlengkapan Kantor/kebutuhan komputer dan printer	unit			sekretariat	3	3	3		
	1) Komputer	1) Komputer					9	-	-		
	2) Printer	2) Printer					7	5	1		
	3) Laptop/Notebook	3) Laptop/Notebook					2	1	1		
	4) LCD Proyektor dan layar	4) LCD Proyektor dan layar					1	1	-		
	Terpeliharanya gedung kantor	Terpeliharanya gedung kantor	unit			sekretariat	1	1	1		

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Formulasi/rumus Indikator	Satuan	Realisasi		Penanggungjawab	Target Kinerja		
						2015	2016		2017	2018	2019
			Terpeliharanya kendaraan dinas	Terpeliharanya kendaraan dinas	unit	7 mobil, 13 motor	7 mobil, 12 motor	sekretariat	1	1	1
			Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor (AC)	Jumlah perlengkapan gedung kantor (AC) yang dipelihara	unit	18	18	sekretariat	18	25	30
			Terpeliharanya peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	unit	36	36	sekretariat	40	45	45
			1) Mesin Ketik	1) Mesin Ketik							
			2) Komputer, Printer, Laptop	2) Komputer, Printer, Laptop							
			3) Alat-alat Studio	3) Alat-alat Studio							
			Terpeliharanya mebeleur	Terpeliharanya mebeleur	unit	17	17	sekretariat	17	17	17
			Pembangunan Gedung Kantor	Pembangunan Gedung Kantor	unit	-	-	sekretariat	1	1	1
			Terpenuhinya kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet	Jumlah bulan kebutuhan komunikasi, air, listrik dan internet yang terpenuhi	bulan	12	12	sekretariat	12	12	12
			Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan benda pos	Terpenuhinya kebutuhan alat tulis kantor dan benda pos	bulan	12	12	sekretariat	12	12	12
			Terpenuhinya kebutuhan barang cetakan dan penggandaan	Jumlah bulan kebutuhan barang cetakan dan penggandaan terpenuhi	bulan	12	12	sekretariat	12	12	12
			Terpenuhinya kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah kebutuhan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor terpenuhinya	bulan	12	12	sekretariat	12	12	12
			Terpenuhinya kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah bulan kebutuhan peralatan dan perlengkapan kantor terpenuhinya	bulan	12	12	sekretariat	12	12	12
			Tersedianya surat kabar dan majalah	Jumlah bulan surat kabar dan majalah terpenuhi	bulan	12	12	sekretariat	12	12	12
			Terpenuhinya makanan dan minuman	Jumlah bulan makanan dan minuman terpenuhi	bulan	11	11	sekretariat	11	11	11
			Terpenuhinya perjalanan dinas luar daerah	Jumlah bulan perjalanan dinas luar daerah terpenuhi	bulan	12	12	sekretariat	12	12	12

Tabel 2.4
Review terhadap Rancangan Awal RKPd Tahun 2018
Kabupaten Tegal

No	Rancangan Awal RKPd					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kab. Tegal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019	1 paket	385,500,000	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	BKD Kab. Tegal	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019	1 paket	399,500,000	
1	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD Kab. Tegal	Peralatan dan perlengkapan kantor dapat dioperasikan dengan baik		120,000,000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	BKD Kab. Tegal	Peralatan dan perlengkapan kantor dapat dioperasikan dengan baik		120,000,000	
			a. Rekening telepon 2 nomor dan internet	12 bulan				a. Tersedianya Jasa Rekening telepon 2 nomor dan internet	12 bulan		
			b. Rekening PDAM 1 unit	12 bulan				b. Tersedianya Jasa Rekening PDAM 1 unit	12 bulan		
			c. Rekening listrik 1 unit	12 bulan				c. Tersedianya Jasa Rekening listrik 1 unit	12 bulan		
2	Penyediaan alat tulis kantor	BKD Kab. Tegal	Pengadministrasian pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik		50,000,000	Penyediaan alat tulis kantor	BKD Kab. Tegal	Pengadministrasian pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik		52,500,000	
			a. ATK	75 jenis				a. Tersedianya ATK antara lain Kertas HVS, Balpoint, dll	75 jenis		
			b. Materai	160 lembar				b. Tersedianya Materai	200 lembar		
			c. Perangko	125 lembar				c. Tersedianya Perangko	100 lembar		
3	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKD Kab. Tegal	Pengadministrasian pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik		36,500,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	BKD Kab. Tegal	Pengadministrasian pelaksanaan tugas dapat berjalan dengan baik		45,000,000	
			a. Barang Cetak	20 jenis				a. Tersedianya Barang Cetak seperti stopmap, kop surat, dll	20 jenis		
			b. Penggandaan	36,500 lembar				b. Tersedianya jasa penggandaan/fotocopy	36,500 lembar		
								c. Tersedianya Cetak Banner non kegiatan	112.5 meter		
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		6,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya kebutuhan Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor		10,000,000	
			Komponen instalasi listrik / penerangan bangunan kantor	12 jenis				Tersedianya lampu pijar, kabel listrik, tempat lampu, dll	12 jenis		
5	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kenyamanan dalam pelaksanaan Tugas Kedinasan		11,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kenyamanan dalam pelaksanaan Tugas Kedinasan		15,000,000	
			a. Peralatan kebersihan	25 jenis				a. Tersedianya Peralatan kebersihan seperti sapu, tempat sampah, bahan pembersih, dll	25 jenis		
			b. Gas elpiji	8 isi tabung				b. Tersedianya Gas elpiji	8 isi tabung		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD Kab. Tegal	Peningkatan Pengetahuan PNS		12,000,000	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD Kab. Tegal	Peningkatan Pengetahuan PNS		12,000,000	
			a. Surat Kabar harian Suara Merdeka	1,500 eksemplar				a. Tersedianya Surat Kabar harian Suara Merdeka	1,675 eksemplar		
			b. Surat Kabar harian Radar	1,440 eksemplar				b. Tersedianya Surat Kabar harian Radar	1,675 eksemplar		
7	Penyediaan makanan dan minuman	BKD Kab. Tegal	Peningkatan Semangat Kerja Pegawai		30,000,000	Penyediaan makanan dan minuman	BKD Kab. Tegal	Peningkatan Semangat Kerja Pegawai		30,000,000	
			a. Minum harian	54 pegawai				a. Tersedianya Minuman Harian	53 pegawai		
			b. Makan minum rapat	120 dus				b. Tersedianya Makan minum rapat	120 dus		
			c. Makan minum tamu	80 dus				c. Tersedianya Makan minum tamu	80 dus		
8	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD Kab. Tegal	Pelaksanaan Tugas Dapat Berjalan Dengan Lancar Perjalanan Dinas	1 paket	120,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	BKD Kab. Tegal	Pelaksanaan Tugas Dapat Berjalan Dengan Lancar Terlaksananya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	11 bulan	115,000,000	
	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD Kab. Tegal	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019	1 paket	460,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	BKD Kab. Tegal	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019	1 paket	639,000,000	
9	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas kendaraan dinas operasional (motor)	3 unit	60,000,000	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas Tersedianya sepeda motor kendaraan dinas operasional	6 unit	120,000,000	
10	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor BKD		25,000,000	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya Perlengkapan Gedung Kantor BKD		30,000,000	
			a. Air Conditioner	5 unit				a. Tersedianya Air Conditioner	4 unit		
			b. Microphone ruang rapat	1 set				b. Tersedianya Microphone ruang rapat	1 set		
11	Pengadaan mebeleur	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor BKD almari arsip	3 unit	20,000,000	Pengadaan mebeleur	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya perlengkapan gedung kantor BKD Tersedianya Almari Arsip	3 unit	20,000,000	
12	Pengadaan Peralatan Kantor	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya Peralatan kantor		20,000,000	Pengadaan Peralatan Kantor	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya Peralatan kantor		40,000,000	
			a. LCD Projector	2 unit				a. Tersedianya LCD Projector	1 unit		
			b. Laptop	2 unit				b. Tersedianya Laptop	1 unit		
			c. Printer	3 unit				c. Tersedianya Printer	3 unit		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKD Kab. Tegal	Peningkatan Kenyamanan Pelaksanaan Tugas		90,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	BKD Kab. Tegal	Peningkatan Kenyamanan Pelaksanaan Tugas		100,000,000	
			Pemeliharaan gedung kantor	1 paket				a. Tersesainya rehabilitasi tempat parkir	1 paket		
								b. Tersedianya KM/WC	1 unit		
								c. Tersedianya bangunan gudang	1 unit		
								d. terpeliharanya bangunan gedung kantor	12 bulan		
14	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKD Kab. Tegal	Operasional Pelaksanaan Tugas Dapat Berjalan Dengan Baik		185,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	BKD Kab. Tegal	Operasional Pelaksanaan Tugas Dapat Berjalan Dengan Baik		195,000,000	
			a. Service kendaraan dinas (7 Mobil; 13 motor)	12 bulan				a. Service kendaraan dinas (6 Mobil; 13 motor)	12 bulan		
			b. Penggantian suku cadang (7 Mobil; 13 motor)	12 bulan				b. Penggantian suku cadang (6 Mobil; 13 motor)	12 bulan		
			c. Biaya bahan bakar dan oli (7 Mobil; 13 motor)	12 bulan				c. Biaya bahan bakar dan oli (6 Mobil; 13 motor)	12 bulan		
			d. STNK (7 Mobil; 13 motor)	1 paket				d. STNK (6 Mobil; 13 motor)	19 unit		
15	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BKD Kab. Tegal	Kenyamanan Lingkungan Kantor & Pelayanan Yang Optimal		15,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	BKD Kab. Tegal	Kenyamanan Lingkungan Kantor & Pelayanan Yang Optimal		15,000,000	
			Perbaikan dan perawatan berkala AC (17 unit)	12 bulan				Perbaikan dan perawatan berkala AC (12 unit)	12 bulan		
16	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas		20,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kenyamanan dalam pelaksanaan tugas		20,000,000	
			a. Mesin Ketik (6 unit)	12 bulan				a. Terawatnya Mesin Ketik (3 unit)	12 bulan		
			b. Komputer (47 unit)	12 bulan				b. Terawatnya Komputer Desktop (30 unit)	12 bulan		
			c. Printer (42 unit)	12 bulan				c. Terpeliharanya Printer (35 unit)	12 bulan		
			d. Notebook (44 unit)	12 bulan				d. Terpeliharanya Laptop/Notebook (28 unit)	12 bulan		
			e. LCD Proyektor (6 unit)	12 bulan				e. Terpeliharanya LCD Proyektor (3 unit)	12 bulan		
17	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BKD Kab. Tegal	Peningkatan Kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan		5,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala mebeleur	BKD Kab. Tegal	Peningkatan Kenyamanan dalam Pelaksanaan Tugas Kedinasan		7,500,000	
			Jasa Pemeliharaan mebeleur	1 paket				Jasa Pemeliharaan mebeleur	50 set		
18	Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian	BKD Kab. Tegal	Terawatnya file kepegawaian dan tersedianya file kepegawaian yang valid dan akurat		15,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala Arsip Kepegawaian	BKD Kab. Tegal	Terawatnya file kepegawaian dan tersedianya file kepegawaian yang valid dan akurat		66,500,000	
			Pemeliharaan rutin arsip/file kepegawaian	12,500 file				Pemeliharaan rutin arsip/file kepegawaian	12,500 file		
			b. Pembangunan Arsip Kepegawaian Digital	1 paket				Pembangunan Arsip Kepegawaian Digital	1 paket		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	BKD Kab. Tegal	Meningkatnya pemahaman peserta tentang peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian		30,000,000	Sosialisasi peraturan perundang-undangan	BKD Kab. Tegal	Meningkatnya pemahaman peserta tentang peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian		30,000,000	
			Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	100 orang				Pelaksanaan Sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang kepegawaian	100 orang		
25	Pendidikan dan pelatihan prajabatan bagi calon PNS Daerah	BKD Kab. Tegal	Terkirimnya Diklat Prajabatan CPNSD Bidan		-	Pendidikan dan Pelatihan Prajabatan bagi CPNSD	BKD Kab. Tegal	Terkirimnya Diklat Prajabatan CPNSD Bidan dan PPL Pertanian		3,400,000,000	
								Pengiriman dan Pelaksanaan Diklat Prajabatan CPNSD Bidan dan PPL Pertanian	252 orang		
26	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	BKD Kab. Tegal	Meningkatnya kompetensi PNS pengampu Jabatan Fungsional Tertentu melalui bintek dan diklat fungsional	35 orang	200,000,000	Pendidikan dan pelatihan fungsional bagi PNS daerah	BKD Kab. Tegal	Meningkatnya kompetensi PNS pengampu Jabatan Fungsional Tertentu melalui bintek dan diklat fungsional	200 orang	750,000,000	
			a. Diklat pembentukan dan diklat lanjutan bagi JFT formasi CPNS					a. Diklat pembentukan dan diklat lanjutan bagi JFT formasi CPNS			
			b. Diklat Dasar Satpol PP pola 150 JP sejumlah 2 Angkatan					b. Diklat Dasar Satpol PP pola 150 JP sejumlah 2 Angkatan			
			c. pengiriman diklat fungsional pola cost sharing bagi pengampu JFT bidang kesehatan, pendidikan dan teknis					c. pengiriman diklat fungsional pola cost sharing bagi pengampu JFT bidang kesehatan, pendidikan dan teknis			
27	Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS daerah	BKD Kab. Tegal	Meningkatnya kompetensi PNS pengampu JFU dan Pejabat Struktural melalui bintek dan diklat teknis	160 orang	600,000,000	Pendidikan dan pelatihan teknis bagi PNS daerah	BKD Kab. Tegal	Meningkatnya kompetensi PNS pengampu JFU dan Pejabat Struktural melalui bintek dan diklat teknis	100 orang	100,000,000	
			a. Diklat Teknis Penyusunan SPM					a. Diklat Teknis Penyusunan SPM			
			b. Diklat Teknis Tata Naskah Dinas					b. Diklat Teknis Tata Naskah Dinas			
28	Analisis Kebutuhan Diklat	BKD Kab. Tegal	Tersusunnya dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	30 dok/OPD	50,000,000	Analisis Kebutuhan Diklat	BKD Kab. Tegal	Tersusunnya dokumen Analisis Kebutuhan Diklat	48 dok/OPD	80,000,000	
			a. Penyusunan Dokumen AKD pada masing-masing SKPD					a. Penyusunan Dokumen AKD pada masing-masing SKPD			
			b. Harmonisasi dan supervisi AKD pada masing-masing SKPD					b. Harmonisasi dan supervisi AKD pada masing-masing SKPD			
29	Pengadaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD Kab. Tegal	Peningkatan wawasan pengetahuan bagi PNS		5,000,000	Pengadaan buku bacaan dan peraturan perundang-undangan	BKD Kab. Tegal	Peningkatan wawasan pengetahuan bagi PNS		5,000,000	
			Buku perpustakaan	1 paket				Buku perpustakaan	1 paket		
30	Rapat koordinasi kepegawaian	BKD Kab. Tegal	Koordinasi di bidang kepegawaian antara BKD dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat teriaga dengan baik		30,000,000	Rapat koordinasi kepegawaian	BKD Kab. Tegal	Koordinasi di bidang kepegawaian antara BKD dengan SKPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal dapat teriaga dengan baik		30,000,000	
			Pelaksanaan Rakor Kepegawaian	1 kali				Pelaksanaan Rakor Kepegawaian	1 kali		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah	BKD Kab. Tegal	Terpeliharanya kesehatan pejabat eselon II dan III yang melaksanakan check up	20 orang	30,000,000	Pemeriksaan kesehatan aparatur pemerintah	BKD Kab. Tegal	Terpeliharanya kesehatan pejabat eselon II dan III yang melaksanakan check up	20 orang	60,000,000	
32	Penerbitan majalah kepegawaian	BKD Kab. Tegal	Pemahaman tentang peraturan dibidang kepegawaian meningkat	200 eksemplar	30,000,000	Penerbitan majalah kepegawaian	BKD Kab. Tegal	Pemahaman tentang peraturan dibidang kepegawaian meningkat	200 eksemplar	30,000,000	
			Pencetakan majalah Lentera	200 eksemplar				Pencetakan majalah Lentera	200 eksemplar		
	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BKD Kab. Tegal	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019	1 paket	57,500,000	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	BKD Kab. Tegal	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah Dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019	1 paket	65,000,000	
33	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKD Kab. Tegal	Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	5 jenis	12,500,000	Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	BKD Kab. Tegal	Tersusunnya laporan capaian dan realisasi kinerja SKPD	3 jenis	20,000,000	
			a. Tersusunnya Dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ, dan SAKIP	4 kali				a. Tersusunnya dokumen LKJIP, LPPD, LKPJ	4 kali		
			b. Terselenggaranya Rakor PraPOK	12 jenis				b. Terselenggaranya Rakor Pra POK internal	12 jenis		
			c. Tersusunnya Laporan Kinerja Bulanan					c. Tersusunnya laporan kinerja bulanan			
34	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	BKD Kab. Tegal	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	4 bulan	45,000,000	Penatausahaan dan pelaporan administrasi keuangan daerah	BKD Kab. Tegal	Tersusunnya laporan keuangan yang akuntabel	11 bulan	45,000,000	
			a. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	5 jenis				a. Honorarium Pengelola Keuangan SKPD	5 jenis		
			b. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD					b. Tersusunnya Dokumen Laporan Keuangan SKPD			

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKD Kab. Tegal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019		10,500,000	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	BKD Kab. Tegal	Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019		15,000,000	
			Jumlah investor PMA	3 investor				Jumlah investor PMA	3 investor		
			Jumlah investor PMDN	5 investor				Jumlah investor PMDN	5 investor		
			Jumlah nilai investasi PMA	43 milyar				Jumlah nilai investasi PMA	43 milyar		
			Jumlah nilai investasi PMDN	775,770 juta				Jumlah nilai investasi PMDN	775,770 juta		
			Jumlah tenaga kerja terserap investasi PMA	12 orang				Jumlah tenaga kerja terserap investasi PMA	12 orang		
			Jumlah tenaga kerja terserap investasi PMDN	1,000 orang				Jumlah tenaga kerja terserap investasi PMDN	1,000 orang		
35	Penyelenggaraan pameran investasi	BKD Kab. Tegal	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk kepegawaian		10,500,000	Penyelenggaraan pameran investasi	BKD Kab. Tegal	Peningkatan pengetahuan masyarakat tentang produk-produk kepegawaian		15,000,000	
			Keikutsertaan dalam pameran pembangunan tingkat kabupaten	1 kali				Keikutsertaan dalam pameran pembangunan tingkat kabupaten	1 kali		
	Program Pengembangan Data dan Informasi	BKD Kab. Tegal	Program Pengembangan Data dan Informasi Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019		20,000,000	Program Pengembangan Data dan Informasi	BKD Kab. Tegal	Program Pengembangan Data dan Informasi Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019		20,000,000	
36	Penyusunan data dan informasi perencanaan	BKD Kab. Tegal	Tersedianya data dan informasi perencanaan		20,000,000	Penyusunan data dan informasi perencanaan	BKD Kab. Tegal	Tersedianya data dan informasi perencanaan		20,000,000	
			Tersusunnya Data dan informasi perencanaan semesteran	20 dokumen				a. Terselenggaranya forum SKPD	1 kali		
								b. Terselenggaranya Pameran Perencanaan	1 kali		
								c. Tersusunnya Rencana Kerja OPD	5 buku		
	Program Pendidikan Kedinasan	BKD Kab. Tegal	Program pendidikan kedinasan Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019		750,000,000	Program Pendidikan Kedinasan	BKD Kab. Tegal	Program pendidikan kedinasan Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019		2,000,000,000	
			Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan (diklatpim II = 4, III = 10, IV = 26)	40 orang				Jumlah Peserta Diklat Kepemimpinan (diklatpim II = 4, III = 10, IV = 26)	40 orang		
37	Pendidikan penjenjangan struktural	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kompetensi dan pengembangan karier pejabat struktural eselon IV, III dan II		750,000,000	Pendidikan penjenjangan struktural	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kompetensi dan pengembangan karier pejabat struktural eselon IV, III dan II		2,000,000,000	
			a. Pengiriman diklatpim tingkat IV	10 orang				a. Pengiriman diklatpim Tingkat IV	46 orang		
			b. Pengiriman diklatpim Tingkat III	10 orang				b. Pengiriman diklatpim Tingkat III	- orang		
			c. Pengiriman diklatpim Tingkat II	- orang				c. Pengiriman diklatpim Tingkat II	- orang		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kab. Tegal	Program pembinaan dan pengembangan aparatur Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019		2,541,500,000	Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur	BKD Kab. Tegal	Program pembinaan dan pengembangan aparatur Mendukung Pencapaian Target Kinerja Daerah dalam RPJMD Kab. Tegal 2014-2019		4,036,200,000	
			jumlah CPNS	1,700 orang				jumlah CPNS	1,700 orang		
			Jumlah PNS tugas belajar	21 orang				Jumlah PNS tugas belajar	21 orang		
			jumlah kasus kepegawaian	43 kasus				jumlah kasus kepegawaian	43 kasus		
			jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	21 orang				jumlah PNS yang mendapat hukuman disiplin	21 orang		
			jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya	30 orang				jumlah pejabat struktural yang dinilai kompetensinya	30 orang		
			jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan)	32 orang				jumlah jabatan fungsional baru (non guru dan kesehatan)	32 orang		
38	Pengangkatan dan Penempatan CPNSD	BKD Kab. Tegal	Proses pengangkatan dan penempatan CPNSD dapat terlaksana dengan baik		28,000,000	Pengangkatan dan Penempatan CPNSD	BKD Kab. Tegal	Proses pengangkatan dan penempatan CPNSD dapat terlaksana dengan baik		50,000,000	
			a. Pengurusan dan Penerbitan SK CPNS	579 SK				a. Pengurusan dan Penerbitan SK CPNS	579 SK		
			b. Penyerahan SK CPNS	1 kali				b. Penyerahan SK CPNS	1 kali		
39	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	BKD Kab. Tegal	Proses pengurusan SK kenaikan PNS dapat terlaksana tepat waktu dan tepat bayar		115,000,000	Pelayanan Administrasi Kenaikan Pangkat PNS	BKD Kab. Tegal	Proses pengurusan SK kenaikan PNS dapat terlaksana tepat waktu dan tepat bayar		255,000,000	
			a. pengurusan SK KP Golongan I - III	1,000 SK				a. pengurusan SK KP Golongan I - III	1,000 SK		
			b. Fasilitasi SK KP Golongan IV/a - IV/b	100 SK				b. Fasilitasi SK KP Golongan IV/a - IV/b	100 SK		
			c. Pengurusan SK KP Golongan IV/c - IV/e	5 SK				c. Pengurusan SK KP Golongan IV/c - IV/e	5 SK		
			d. Penyerahan SK KP	2 kali				d. Penyerahan SK KP	2 kali		
			e. Rakor Persiapan dan Evaluasi KP	2 kali				e. Rakor Persiapan dan Evaluasi KP	2 kali		
40	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	BKD Kab. Tegal	Adanya database pegawai yang valid dan akurat		65,000,000	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	BKD Kab. Tegal	Adanya database pegawai yang valid dan akurat		110,200,000	
			a. Rakor jaringan kerja data kepegawaian	2 kali				a. Rakor jaringan kerja data kepegawaian	2 kali		
			b. Entry dan update data (KP, Penegrian, FIP CPNS, Karpeg, Karis/Karsu)	5 jenis data				b. Entry dan update data (KP, Penegrian, FIP CPNS, Karpeg, Karis/Karsu)	5 jenis data		
			c. Jaringan kerja data kepegawaian	141 SKPD & UPTD				c. Jaringan kerja data kepegawaian	141 SKPD & UPTD		
			d. Produk Simpeg (DUK, nominatif pejabat, profil pegawai)	3 jenis				d. Produk Simpeg (DUK, nominatif pejabat, profil pegawai)	3 jenis		
			e. Pengusulan pembuatan karpeg, karis/karsu dan KPE	200 kartu				e. Pengusulan pembuatan karpeg, karis/karsu dan KPE	200 kartu		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kinerja dan disiplin PNS		20,000,000	Pemberian penghargaan bagi PNS yang berprestasi	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kinerja dan disiplin PNS		20,000,000	
			Piagam dan tanda penghargaan (SLKS)	200 piagam				Piagam dan tanda penghargaan (SLKS)	200 piagam		
42	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	BKD Kab. Tegal	Terselesainya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		40,000,000	Proses penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS	BKD Kab. Tegal	Terselesainya kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku		40,000,000	
			a. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	50 kasus				a. Penyelesaian kasus-kasus pelanggaran disiplin pegawai	50 kasus		
			b. Sidang kasus pelanggaran disiplin pegawai sebagai tindaklanjut berita acara pemeriksaan atasan langsung/tim pengelola SKPD	4 kali				b. Sidang kasus pelanggaran disiplin pegawai sebagai tindaklanjut berita acara pemeriksaan atasan langsung/tim pengelola SKPD	4 kali		
			c. realisasi hukuman disiplin					c. realisasi hukuman disiplin			
43	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kompetensi dan pengembangan karier PNS		20,000,000	Pemberian bantuan tugas belajar dan ikatan dinas	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kompetensi dan pengembangan karier PNS		20,000,000	
			Bantuan studi	5 orang				Bantuan studi	5 orang		
44	Seleksi penerimaan calon ASN	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya kebutuhan pegawai ASN		675,000,000	Seleksi penerimaan calon ASN	BKD Kab. Tegal	Terpenuhinya kebutuhan pegawai ASN		800,000,000	
			a. Pengadaan CPNS Formasi Umum					a. Pengadaan CPNS Formasi Umum			
			b. Pengadaan CPNS dari THK2	579 orang				b. Pengadaan CPNS dari THK2	579 orang		
			c. Pengadaan PPPK					c. Pengadaan PPPK			
			d. Usul Penetapan NIP	579 orang				d. Usul Penetapan NIP	579 orang		
45	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kompetensi dan pengembangan karier PNS		70,000,000	Ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kompetensi dan pengembangan karier PNS		120,000,000	
			Ujian kenaikan pangkat penyesuaian jasad dan ujian dinas	120 orang				Ujian kenaikan pangkat penyesuaian jasad dan ujian dinas	120 orang		
46	Pengangkatan dan Pengisian JPT Pratama dan Administrasi ASN	BKD Kab. Tegal	Terisinya jabatan struktural yang kosong		150,000,000	Pengangkatan dan pengisian jabatan struktural	BKD Kab. Tegal	Terisinya jabatan struktural yang kosong		200,000,000	
			a. Pengisian, pengangkatan dan pemindahan jabatan	4 kali				a. Pengambilan sumpah/janji Eselon II (JPT Pratama)	4 kali		
			b. Pelantikan, pengambilan sumpah/ janji jabatan dan penandatanganan Pakta Integritas	3 kali				b. Pengambilan sumpah/janji Eselon III/IV	3 kali		
47	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya proses pengurusan Pensiun PNS tepat waktu dan tepat bayar		60,000,000	Penataan sistem administrasi pensiun PNS	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya proses pengurusan Pensiun PNS tepat waktu dan tepat bayar		90,000,000	
			a. pengurusan SK BUP dan Janda/Duda	400 SK				a. pengurusan SK BUP dan Janda/Duda	400 SK		
			b. Pengurusan dan Penerbitan APS Golongan I sd III	8 SK				b. Pengurusan dan Penerbitan APS Golongan I sd III	8 SK		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			c. Pengurusan Fasilitas APS Golongan IV	10 SK				c. Pengurusan Fasilitas APS Golongan IV	10 SK		
			d. Penyerahan SK Pensiun dan Sosialisasi Taspen dan Bapertarum PNS	3 kali				d. Penyerahan SK Pensiun dan Sosialisasi Taspen dan Bapertarum PNS	3 kali		
48	Pembinaan disiplin pegawai	BKD Kab. Tegal	Peningkatan disiplin PNS melalui sidak		15,000,000	Pembinaan disiplin pegawai	BKD Kab. Tegal	Peningkatan disiplin PNS melalui sidak		15,000,000	
			Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) terhadap PNS	2 kali				Pelaksanaan inspeksi mendadak (sidak) terhadap PNS	2 kali		
49	Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya pembelian penghargaan bagi PNS purna tugas		70,000,000	Pemberian penghargaan bagi PNS purna tugas dan pelepasan kepala SKPD purna tugas	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya pembelian penghargaan bagi PNS purna tugas		110,000,000	
			Pemberian plakat	350 buah				Kegiatan pelepasan PNS purna tugas	3 kali		
								Pemberian plakat	350 buah		
50	Penataan sistem administrasi gaji PNS	BKD Kab. Tegal	Terealisasinya penerbitan SP KGB PNS yang tepat waktu dan tepat bayar		20,000,000	Penataan sistem administrasi gaji PNS	BKD Kab. Tegal	Terealisasinya penerbitan SP KGB PNS yang tepat waktu dan tepat bayar		50,000,000	
			a. Penerbitan SP KGB Pejabat Struktural	500 SK				a. Penerbitan SP KGB Pejabat Struktural	500 SK		
			b. Penerbitan SP KGB Staf Kecamatan dan Kelurahan	100 SK				b. Penerbitan SP KGB Staf Kecamatan dan Kelurahan	100 SK		
51	Pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas	BKD Kab. Tegal	Peningkatan pengetahuan PNS menjelang Purna tugas		35,000,000	Pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas	BKD Kab. Tegal	Peningkatan pengetahuan PNS menjelang Purna tugas		35,000,000	
			Terlaksananya pemberian pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas	200 orang				a. Terlaksananya pemberian pembekalan bagi PNS menjelang purna tugas	2 kali		
								b. PNS yang mengikuti pembekalan	200 orang		
52	Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi PNS	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya mutasi kepegawaian PNS sesuai dengan kompetensi		75,000,000	Penataan administrasi mutasi, evaluasi dan alih fungsi PNS	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya mutasi kepegawaian PNS sesuai dengan kompetensi		100,000,000	
			a. Alih fungsi PNS (JFU ke JFT, JFU ke JFU lainnya, JFT ke JFT lainnya)	10 PNS				a. Alih fungsi PNS (JFU ke JFT, JFU ke JFU lainnya, JFT ke JFT lainnya)	10 PNS		
			b. Rotasi/perpindahan antar SKPD dalam daerah (JFU)	3 kali				b. Rotasi/perpindahan antar SKPD dalam daerah (JFU)	3 kali		
			c. Pengurusan mutasi antar instansi luar daerah (mutasi masuk dan keluar)	40 PNS				c. Pengurusan mutasi antar instansi luar daerah (mutasi masuk dan keluar)	40 PNS		
			d. Pelaksanaan sidang/rapat Baperjakat	4 kali				d. Pelaksanaan sidang/rapat Baperjakat	4 kali		
53	Pengelolaan LHKPN	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)		11,000,000	Pengelolaan LHKPN	BKD Kab. Tegal	Peningkatan kepatuhan pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN)		11,000,000	
			Laporan LHKPN	38 dokumen				Laporan LHKPN	38 dokumen		

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian kepala sekolah		35,000,000	Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan kepala sekolah	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya pengangkatan, perpindahan dan pemberhentian kepala sekolah		40,000,000	
			a. Pelantikan, pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas kepala sekolah	1 kali				a. Pelantikan, pengambilan sumpah dan penandatanganan Pakta Integritas kepala sekolah	1 kali		
			b. ME Kepala Sekolah (pemberhentian kepala sekolah)	1 kali				b. ME Kepala Sekolah (pemberhentian kepala sekolah)	1 kali		
55	Uji Kompetensi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya uji kompetensi bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal		415,000,000	Uji Kompetensi JPT Pratama, Administrator dan Pengawas	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya uji kompetensi bagi pejabat struktural di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal		750,000,000	
			a. Uji kompetensi jabatan administrator	5 batch				a. Uji kompetensi jabatan pengawas (calon administrator)	10 batch		
			b. Uji kompetensi jabatan pengawas	5 batch				b. Uji kompetensi jabatan pelaksana (calon Pengawas)	10 batch		
			c. Uji kompetensi pelaksana	5 batch				c. Uji kompetensi jabatan fungsional tertentu	10 batch		
56	Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar	BKD Kab. Tegal	Terealisasinya pengelolaan administrasi surat persetujuan melanjutkan pendidikan, surat izin belajar dan SK tugas belajar		20,000,000	Penataan administrasi ijin melanjutkan pendidikan, ijin belajar, surat keterangan penggunaan gelar dan tugas belajar	BKD Kab. Tegal	Terealisasinya pengelolaan administrasi surat persetujuan melanjutkan pendidikan, surat izin belajar dan SK tugas belajar		25,000,000	
			a. Penerbitan surat persetujuan dan surat izin belajar	300 orang				a. Penerbitan surat persetujuan dan surat izin belajar	300 orang		
			b. Penerbitan SK tugas belajar	3 orang				b. Penerbitan SK tugas belajar	3 orang		
57	Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun	BKD Kab. Tegal	Adanya status hukum kepegawaian bagi PNS yang mengalami gangguan fisik atau psikis		10,000,000	Pemeriksaan kesehatan bagi PNS yang terkena sakit menahun	BKD Kab. Tegal	Adanya status hukum kepegawaian bagi PNS yang mengalami gangguan fisik atau psikis		15,000,000	
			Rekomendasi dari tim penguji kesehatan PNS yang mengalami gangguan fisik/psikis	10 orang				Rekomendasi dari tim penguji kesehatan PNS yang mengalami gangguan fisik/psikis	10 orang		
58	Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	BKD Kab. Tegal	Pelayanan administrasi kepegawaian dapat terkelola dan terfasilitasi dengan baik		50,000,000	Pengelolaan dan fasilitasi pelayanan administrasi kepegawaian	BKD Kab. Tegal	Pelayanan administrasi kepegawaian dapat terkelola dan terfasilitasi dengan baik		80,000,000	
			a. pengelolaan SAPK BKN Online	12 bulan				a. pengelolaan SAPK BKN Online	12 bulan		
			b. Pengurusan angka kredit dan pengangkatan pertama JFT Instansi pembina pusat dan provinsi	30 JFT				b. Pengurusan angka kredit dan pengangkatan pertama JFT Instansi pembina pusat dan provinsi	20 JFT		
59	Penataan jabatan fungsional tertentu	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya administrasi jabatan fungsional tertentu yang meliputi pengangkatan pertama, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan kenaikan jabatan fungsional tertentu		40,000,000	Penataan jabatan fungsional tertentu	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya administrasi jabatan fungsional tertentu yang meliputi pengangkatan pertama, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali dan kenaikan jabatan fungsional tertentu		125,000,000	

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp. 000)	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp. 000)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya penatausahaan administrasi PTT		15,000,000	Penataan Administrasi dan Pembinaan Pegawai Tidak Tetap	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya penatausahaan administrasi PTT		15,000,000	
			Pelaksanaan penatausahaan administrasi PTT	110 PTT				Pelaksanaan penatausahaan administrasi PTT	110 PTT		
66	Rekrutmen Calon Pejabat Kabupaten Tegal/Seleksi Terbuka JPT Pratama, Pengawas & Administrator	BKD Kab. Tegal	Terealisasinya seleksi jabatan lowong secara terbuka		250,000,000	Rekrutmen Calon Pejabat Kabupaten Tegal	BKD Kab. Tegal	Terealisasinya seleksi jabatan lowong secara terbuka		500,000,000	
			a. seleksi JPT Pratama	1 kali				a. seleksi JPT Pratama	1 kali		
			b. Uji kompetensi Calon JPT Pratama	1 batch				b. seleksi calon Camat/ Lurah se Kab. Tegal	2 kali		
67	Evaluasi Paska Diklat	BKD Kab. Tegal	Terevaluasinya pelaksanaan diklat serta tingkat penyerapan materi dan pemanfaatan hasil diklat	40 orang	40,000,000	Evaluasi Paska Diklat	BKD Kab. Tegal	Terevaluasinya pelaksanaan diklat serta tingkat penyerapan materi dan pemanfaatan hasil diklat	100 orang	100,000,000	
			a. evaluasi diklat terhadap alumni dan atasan langsung					a. evaluasi diklat terhadap alumni dan atasan langsung			
			b. penyusunan hasil evaluasi paska diklat					b. penyusunan hasil evaluasi paska diklat			
68	Penilaian dan pemberian penghargaan kepada PNS teladan	BKD Kab. Tegal	adanya penghargaan kepada PNS teladan di tingkat SKPD dan Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal		40,000,000	Penilaian dan pemberian penghargaan kepada PNS teladan	BKD Kab. Tegal	adanya penghargaan kepada PNS teladan di tingkat SKPD dan Kabupaten di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal		50,000,000	
			a. Seleksi PNS teladan level SKPD	1 kali				a. Seleksi PNS teladan level SKPD	1 kali		
			b. Seleksi PNS teladan level Kabupaten	1 kali				b. Seleksi PNS teladan level Kabupaten	1 kali		
			c. Pemberian Penghargaan kepada PNS teladan	1 kali				c. Pemberian Penghargaan kepada PNS teladan	1 kali		
69	Penataan Administras dan Pengembangan Kompetensi Kediklatan ASN	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya penatausahaan dan pengembangan kompetensi kediklatan ASN		12,500,000	Penataan Administras dan Pengembangan Kompetensi Kediklatan ASN	BKD Kab. Tegal	Terlaksananya penatausahaan dan pengembangan kompetensi kediklatan ASN		20,000,000	
			a. Penyusunan peraturan bupati	5 perbup				a. Penyusunan peraturan bupati	5 perbup		
			b. Rakor dan sosialisasi kediklatan	2 keg				b. Rakor dan sosialisasi kediklatan	2 keg		
70	Pengelolaan Administrasi TPP, JKK dan JKM	BKD Kab. Tegal	Pengurusan klaim JKK dan JKM, dan terlaksananya koordinasi pemberian TPP	20 orang	20,000,000	Pengelolaan Administrasi TPP, JKK dan JKM	BKD Kab. Tegal	Pengurusan klaim JKK dan JKM, dan terlaksananya koordinasi pemberian TPP	20 orang	30,000,000	
			a. Pembuatan Perbup	1 buah				a. Pembuatan Perbup	1 buah		
			b. Kegiatan Study banding	2 kali				b. Kegiatan Study banding	2 kali		
			c. Kegiatan rapat koordinasi	5 kali				c. Kegiatan rapat koordinasi	5 kali		
			JUMLAH ANGGARAN		5,605,000,000			JUMLAH ANGGARAN		12,282,700,000	